

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA B-29 DI DESA
ARGOSARI KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

FARAHDIBA ELFA PUTRI NAWANGSIH

NIM. 165030101111003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

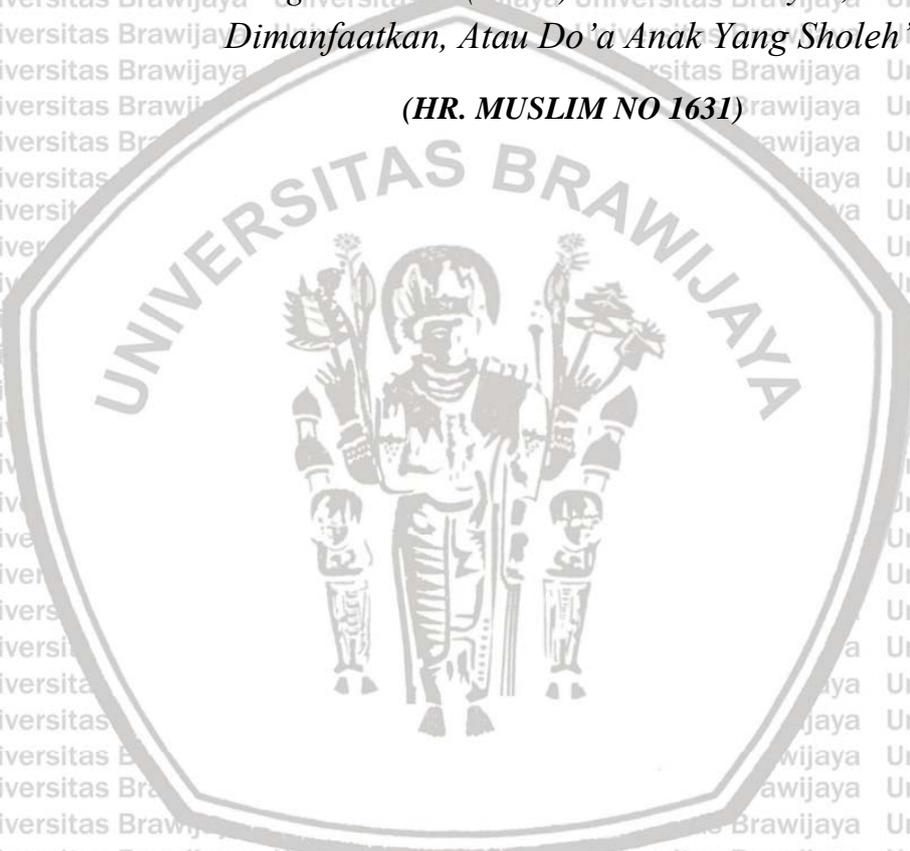
2020



MOTTO

*“Jika Seseorang Meninggal Dunia, Maka Terputuslah Amalannya
Kecuali Tiga Perkara (Yaitu): Sedekah Jariah, Ilmu Yang
Dimanfaatkan, Atau Do’a Anak Yang Sholeh”*

(HR. MUSLIM NO 1631)



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 03 Juli 2020
Jam : 11.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Farahdiba Elfa Putri Nawangsih
Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

[Signature of Mochamad Chazienul Ulum]

[Signature of Ali Maskur]

Mochamad Chazienul Ulum, Sos., M.AP
NIP. 19740614 200501 1 001

Ali Maskur, SAP., MAP., MA
NIP. 19740614 200501 1 001

Penguji I

Penguji II

[Signature of Rendra Eko Wismanu]

[Signature of Suhartono Winoto]

Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP
NIP. 20110785 1214 1 001

Suhartono Winoto, S.AP., M.AP
NIP. 20160789 0808 1 001



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di
Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
Disusun Oleh : Farahdiba Elfa Putri Nawangsih
NIM : 165030101111003
Fakultas : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 04 Maret 2020

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Mochamad Chazienul Ulum, Sos., M.P.A.
NIP. 19740614 200501 1 001

Ali Maskur S.A.P., M.A.P., MA
NIP. 19860716 2014041 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata B-29 Di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 28 April 2019



Farahdiba Elfi Putri Nawangsih

NIM : 165030101111003

Dipindai dengan CamScanner

RINGKASAN

Farahdiba Elfa Putri Nawangsih, **Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang**, Ketua: Mochamad Chazienul Ulum, Sos., M.PA. Anggota: Ali Maskur S.AP., M.AP.,MA,

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur yang memiliki potensi wisata alam yang bagus. Salah satu wisata alam yang terkenal di kabupaten ini ialah Bukit 29 atau yang sering dikenal dengan sebutan *Puncak B-29*. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dikompilasikan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari. (2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif karena tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata B-29. Namun, permasalahannya disini partisipasi masyarakat dinilai belum optimal. Partisipasi belum berjalan optimal dikarenakan adanya beberapa kendala yang menghambat yaitu: kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat dalam mengembangkan objek pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Argosari kawasan wisata *Puncak B-29*, beberapa masyarakat kawasan wisata sudah terlibat aktif dalam mengembangkan pariwisata *B-29* salah satunya terlibat dalam paguyuban ojek. Namun, disini lain partisipasi masyarakat belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari tahapan dalam berpartisipasi mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pengembangan, operasional dan pengawasan. Selain itu, faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat di Desa Argosari dalam mengembangkan pariwisata B-29 juga menjadi problematik dalam partisipasi masyarakat. Adapun saran yang diberikan peneliti disini yaitu : 1. Pemerintah melakukan pertemuan yang rutin atau bersifat (*continue*), 2. Pokdarwis lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan 3. Masyarakat Desa Argosari lebih mengembangkan kearifan lokal yang dimiliki.

Kata kunci : Partisipasi masyarakat, pengembangan objek wisata, *Puncak B-29*

SUMMARY

Farahdiba Elfa Putri Nawangsih, **Community Participation in the Development of Tourism B-29 in Argosari Village, Senduro District Lumajang Regency**, Advisor: Mochamad Chazienul Ulum, Sos., M.PA. Co-Advisor: Ali Maskur S.AP., M.AP., MA,

Lumajang Regency is one of the regencies in East Java that has good natural tourism potential. One of the famous natural attractions in this district is *Bukit 29* or often known as *Puncak B-29*. Based on this, the formulation of the problems compiled in this study are: (1) How is community participation in the development of B-29 tourism in Argosari Village, Senduro Sub District Lumajang Regency, (2) what are the supporting factors and obstacles to community participation in the development of B-29 tourism. The objectives of this study are: (1) Determine community participation in the development of B-29 tourism in Argosari Village. (2) Knowing the supporting and inhibiting factors of community participation in the development of B-29 tourism in Argosari Village.

In this study, the method used is descriptive qualitative because the purpose of this study is to describe community participation in developing B-29 tourism. But, here the problem is not considered optimal community participation. Participation is not optimal due to some obstacles that men g inhibitory ie approximately in accordance with the needs of the community, lack of knowledge and education in the community develop the tourism objects.

Based on the results of research in the Argosari Village *Puncak B-29* tourism area, several tourism area communities have been actively involved in developing B-29 tourism, one of which is involved in the ojek community. However, on the other hand community participation has not been carried out optimally this can be seen from the syages in participating starting from the preparation, planninh, development, operational and supervision. In addition, the supporting actors and inhibitors of community participation in Argosari Village in developing B-29 tourism are also probelmatic in community participation. The suggestions given by researchers here are: 1. The government conducts regular or *continuous* meetings, 2. Pokdarwis is more intensive to increase community participation, and 3. The Argosari Village community develops more local wisdom they have.

Keywords: Community participation, tourist attraction development, *Puncak B-29*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari segalanya.....

Sembah Sujud Kepada Allah SWT.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi kedua Orang Tua ku sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga serta tiada mungkin dapat kubalas hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

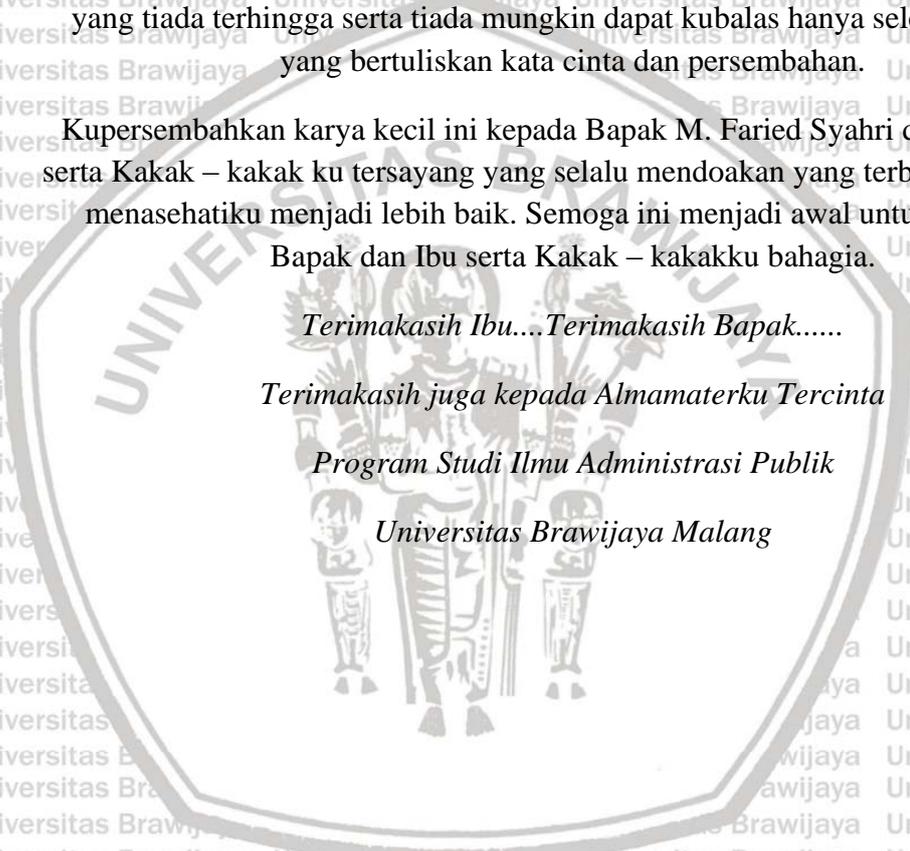
Kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak M. Faried Syahri dan Ibu Latifa serta Kakak – kakak ku tersayang yang selalu mendoakan yang terbaik buatku dan menasehatiku menjadi lebih baik. Semoga ini menjadi awal untuk membuat Bapak dan Ibu serta Kakak – kakakku bahagia.

Terimakasih Ibu.....Terimakasih Bapak.....

Terimakasih juga kepada Almamaterku Tercinta

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Universitas Brawijaya Malang



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”** yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari segala pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya M.DA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Jurusan Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Mochamad Chazienul Ulum, Sos., M.PA dan Bapak Ali Maskur S.AP., M.AP., MA. Selaku Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang selama ini telah memberikan dan menularkan kajian keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staff pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang senantiasa meluangkan waktu, mengarahkan, mendampingi, dan memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Supriyanto dan Bapak Nova selaku pengelola wisata B-29 yang telah berkontribusi dalam memberikan data terkait dengan tema skripsi ini.
9. Bapak Budiyanto selaku Ketua Pokdarwis dan Bapak Dian selaku Pengelola Paguyuban Ojek yang juga senantiasa memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan penyusunan skripsi ini.
10. Para narasumber yang bersedia dalam memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

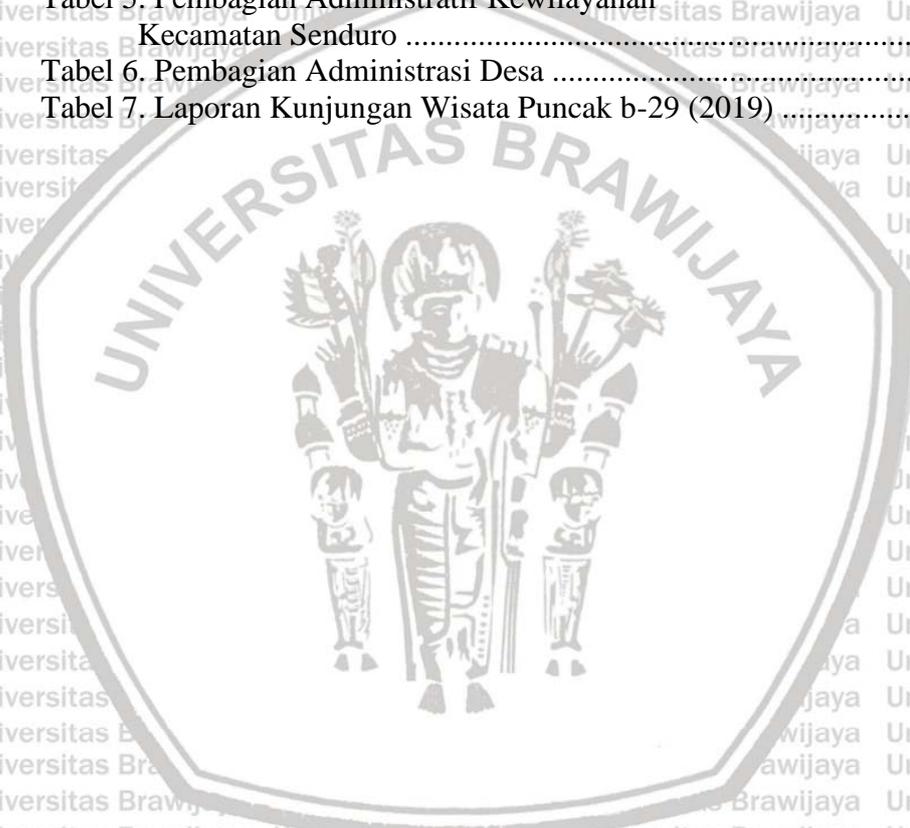
MOTTO	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	11
I.3 Tujuan Penelitian	11
I.4 Kontribusi Penelitian	12
I.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
II. 1 Penelitian Terdahulu	15
II. 2 Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan	19
II.2. 1 Pengertian Administrasi Publik	19
II. 2. 2 Pengertian Administrasi Pembangunan	21
II. 3 Pariwisata	22
II. 3. 1 Pengertian Pariwisata	22
II. 3. 2 Jenis – jenis Pariwisata	22
II. 3. 3 Produk Pariwisata	24
II. 3. 4 Sapta peosona Pariwisata	25
II. 3. 5 Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism</i>)	27
II. 4 Partisipasi Masyarakat	28
II. 4. 1 Peran Masyarakat	28
II. 4. 2 Partisipasi Masyarakat	29
II. 4. 3 Teori <i>Ladder Of Citizen Participation</i>	32
II. 4. 4 Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat	35
II. 5. 5 Faktor Penghamabt Partisipasi Masyarakat	37
II. 5 Pengembangan Pariwisata	39
II. 5. 1 Definisi Pengembangan Pariwisata	39
II. 5. 2 Upaya Pengembangan Pariwisata	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
III. 1 Jenis Penelitian	44
III. 2 Fokus Penelitian	45



III. 3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	47
III. 4 Jenis dan Sumber Data	48
III. 4. 1 Data Primer	48
III. 4. 2 Data Sekunder	49
III. 5 Teknik Pengumpulan Data	49
III. 6 Instrumen Penelitian	50
III. 7 Analisis Data	52
III. 8 Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
IV. 1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	58
IV. 1. 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
IV. 1. 2 Gambaran Umum Situs Penelitian	67
IV. 2 Penyajian Data Fokus Penelitian	78
IV. 2. 1 Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29.....	78
IV. 2. 2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat terkait Partisipasi Masyarakat	87
IV. 3 Analisis Data	95
IV. 3. 1 Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B- 29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang	95
IV. 3. 2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang	102
BAB V PENUTUP	109
V. 1 Kesimpulan	109
V. 2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik ke Kabupaten Lumajang	6
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. Level Partisipasi menurut Arnstein.....	33
Tabel 4. Objek Wisata Alam Kabupaten Lumajang	63
Tabel 5. Pembagian Administratif Kewilayahan Kecamatan Senduro	66
Tabel 6. Pembagian Administrasi Desa	73
Tabel 7. Laporan Kunjungan Wisata Puncak b-29 (2019)	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan atau Alur Analisis Data Cresswel..... 55

Gambar 2. Peta Kabupaten Lumajang 61

Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Lumajang 72

Gambar 4. Pintu Masuk Puncak B-29 Desa Argosari Kecamatan
Senduro Kabupaten Lumajang 75

Gambar 5. Puncak B-29 Desa Argosari Kecamatan
Senduro Kabupaten Lumajang 76

Gambar 6. Bimbingan Teknis bersama Komisi X DPR RI
(Forum Pokdarwis JATIM) 81

Gambar 7. Persamuhan bersama para pemuka adat, tokoh, sesepuh
dan Tokoh Pemuda di Desa Argosari 84

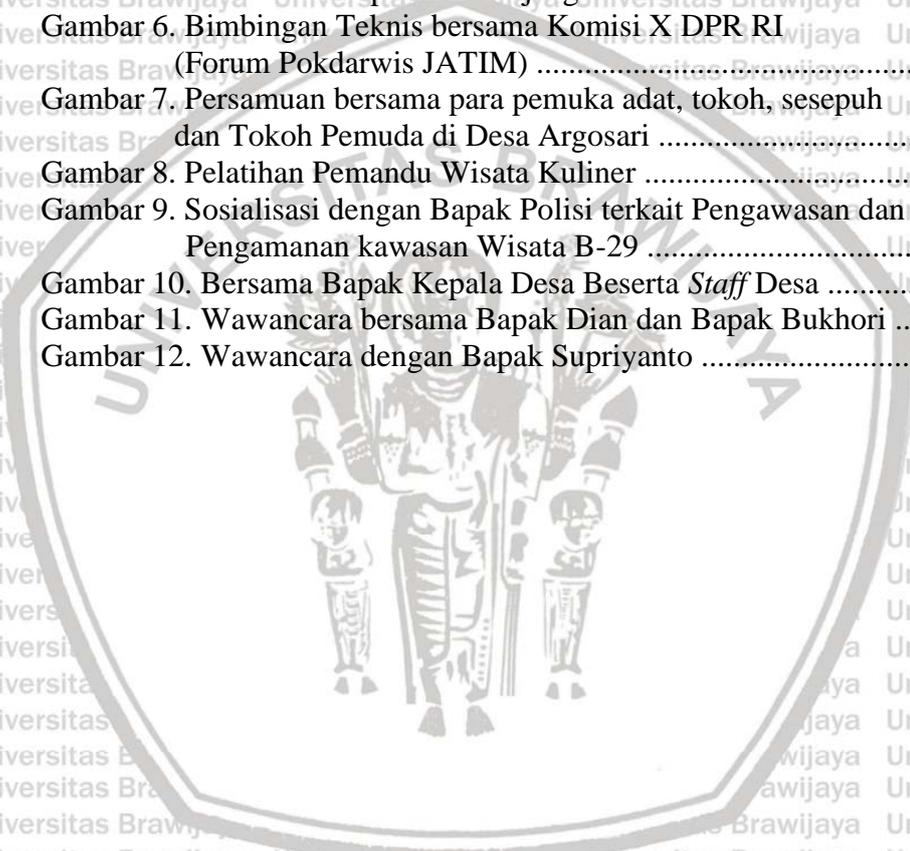
Gambar 8. Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner 86

Gambar 9. Sosialisasi dengan Bapak Polisi terkait Pengawasan dan
Pengamanan kawasan Wisata B-29 89

Gambar 10. Bersama Bapak Kepala Desa Beserta *Staff* Desa 125

Gambar 11. Wawancara bersama Bapak Dian dan Bapak Bukhori 125

Gambar 12. Wawancara dengan Bapak Supriyanto 125



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Riset 116
Lampiran 2. Pedoman *Interview Guide* 117
Lampiran 3. *Logbook* Penelitian 121
Lampiran 4. Foto Observasi/Kegiatan Penelitian 125
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup 126





BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan dalam mendukung pemerintah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pariwisata juga mempunyai peranan strategis dalam pembangunan suatu daerah. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 juga mengatur dimana pariwisata diharapkan menjadi penggerak ekonomi nasional dan daerah melalui pembangunan kepariwisataan. Hal ini juga didukung dengan diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia yang sudah dimulai secara efektif sejak 1 Januari 2001 bahwa setiap Daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya baik dalam hal pendanaan kegiatan pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Diberlakukannya Undang – Undang 23 Tahun 2014 juga mendukung adanya pemberian wewenang pada setiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, yang mana Undang – undang ini menggantikan Undang – Undang 32 Tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang yang lebih luas ke pemerintah daerah ini ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan serta karakteristik daerah tersebut.

Menurut Suryono 2010 (dalam Balkis 2018) menyebutkan bahwa :

“keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam sebuah pembangunan, dikarenakan keterlibatan masyarakat diperlukan dalam memadukan model *top down* dengan *bottom up* supaya program-program di dalam pembangunan dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan sekaligus menjadi sarana motivasi untuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap hasil – hasil dan pelaksanaan pembangunan.”

Pembangunan merupakan langkah yang diambil untuk mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa. Pemerintah daerah, terutama tingkat kabupaten/kota, bukan lagi berperan sebagai “operator” pembangunan, namun juga berfungsi sebagai inisiator, motivator, *planner, controller, supervisor*, dan *fund raising* pembangunan, termasuk sector pariwisata (Sunaryo, 2013). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran serta masyarakat disini menjadi kunci penting untuk keberhasilan pembangunan selain pemerintah. Peran masyarakat dalam bentuk partisipasi, bukan hanya ikut serta dalam pengambilan keputusan atau ikut andil dalam setiap program kegiatan, akan tetapi masyarakat diharapkan lebih aktif sebagai pelaku atau subjek setiap aktifitas yang dilakukan.

Balkis (2018) Partisipasi memiliki arti penting jika dilihat dari manfaatnya, dimana partisipasi ada untuk meningkatkan kualitas kepuasan yang direncanakan karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil

yang ada dan kebutuhan – kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Hal itu sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Tjokroamidjodjo (1995) menyatakan bahwa : “pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat di dalam suatu Negara.” Salah satu pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat yaitu pada pengembangan atau pembangunan di sektor pariwisata.

Menurut Sunaryo (2013) pembangunan pariwisata merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik, yang diarahkan menuju kondisi yang lebih baik atau diinginkan. Pengembangan pariwisata di Indonesia sendiri sudah dilakukan sejak awal tahun 1978, sesuai dengan adanya TAP MPR No. IV/MPR/1978, yang memuat bahwa pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan. Pariwisata sendiri menurut pengertian arti luas adalah perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat sementara, perjalanan ini bisa dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian.

Pariwisata pada saat ini merupakan bentuk nyata dari perjalanan sebuah bisnis global yang sangat menjanjikan karena diperkirakan akan menjadi sebuah sektor yang mampu mendorong ekonomi dunia yang dihasilkan dari pergerakan wisatawanannya. Data dari *World Tourism*

Organization (WTO) juga memberikan gambaran nyata tentang hal tersebut. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata sangat berpengaruh juga dalam pembangunan di suatu daerah.

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata (Suwanto, 1997). Menurut Bafadhal (2018) wisatawan adalah pelancong atau pengunjung sementara atau melakukan perjalanan yang pendek. istilah wisatawan sendiri sering diartikan sebagai orang yang melakukan berpergian ke suatu tempat di luar lingkungannya atau tempat bekerjanya dengan tujuan rekreasi, liburan ataupun edukasi. Pada dasarnya berpariwisata merupakan kebutuhan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Pengembangan pariwisata tentunya diharapkan tidak menimbulkan kejenuhan terhadap para wisatawan yang hadir. Oleh karena itu, motif utama untuk berwisata bersifat pribadi.

Indonesia sendiri memiliki berbagai wilayah yang memiliki potensi pariwisata salah satunya Provinsi Jawa Timur. Jawa timur sendiri dikenal memiliki beragam objek wisata baik itu wisata alam, wisata buatan maupun wisata kebudayaan. Salah satu wisata yang dikenal terletak di Kabupaten Lumajang. Kabupaten yang memiliki kontur wilayah baik dataran tinggi maupun dataran rendah, yang mana kabupaten ini terkenal dengan destinasi

wisatanya yang khas, yaitu jenis wisata alam seperti wisata alam air terjun, danau, pantai, gunung dan masih banyak lagi. Bupati Lumajang periode 2013 – 2018 sangat mendukung adanya pengembangan pariwisata Kabupaten Lumajang. hal ini dibuktikan dengan program kebijakan yang dibuatnya yaitu satu desa satu wisata. Hal itu juga didukung pula dengan diterapkannya konsep Desa Wisata , sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Desa Wisata, bab III pasal 5 diantaranya meliputi :

“a) Kelurahan Ditotruman Kecamatan Lumajang, b) Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono, c) Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang, d) Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah, e) Desa Ranu Kecamatan Klakah, f) Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso, g) Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung, h) Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto, i) Desa Tnggung Kecamatan Padang, j) Desa Argosari Kecamatan Senduro, k) Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe, l) Desa Jokarto Kecamatan Tempeh, m) Desa Selok Awar – awar Kecamatan Pasirian, n) Desa Sidomulyo Kecamatan Tempursari, o) Desa Wonokerto Kecamatan Tekung, p) Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung, q) Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, r) Desa Gucialit Kecamatan Gucialit dan s) Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko.”

Berdasarkan Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa Jumlah pengunjung wisatawan ke Kabupaten Lumajang Tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini : (<https://lumajangkab.bps.go.id/>)

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik ke Kabupaten Lumajang

Tahun	Wisatawan		Jumlah (total)
	Domestik	M mancanegara	
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	578.399	1.610	580.009
2014	872.149	2.827	874.976
2015	895.469	2.455	897.923
2016	933.514	2.367	915.881
2017	3.250.890	7.480	3.258.370

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lumajang (olahan penulis 2020)

Data di atas menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan yaitu total wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lumajang tahun 2013 sebanyak 580.009, 2014 sebanyak 874.976, tahun 2015 sebanyak 897.923, tahun 2016 sebanyak 935.881 dan pada tahun 2017 sebanyak 3.258.370. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pengembangan pariwisata agar Kabupaten Lumajang dikenal lagi. Salah satu pariwisata yang dikembangkan yaitu desa wisata di Argosari, Kecamatan Senduro. Peningkatan jumlah wisatawan juga dikarenakan adanya perbaikan – perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan fasilitas umum, jalan yang awalnya sulit untuk ditempuh dan diharuskan berjalan kaki juga sudah bisa dilewati oleh kendaraan bermotor.

Salah satu desa wisata yang menarik ialah Desa Wisata B-29 di Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Berdasarkan Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang (dalam Buku Data Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang 2016) menyebutkan bahwa Jumlah pengunjung Wisata Puncak B-29 Tahun 2016 yang terdiri dari wisatawan nusantara dengan jumlah 39.065 orang dan wisatawan mancanegara 356 orang. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang ini letaknya pada kontur dataran tinggi adalah Kecamatan Senduro. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang berada pada Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (RIPPARDA Kabupaten Lumajang 2015). Salah satu objek wisata yang menarik dan memiliki keindahan yang sangat luar biasa ialah Objek Wisata B-29 yang dikenal sebagai “Negeri Atas Awan”.

Desa wisata ini menawarkan suasana desa pegunungan masyarakat Tengger. Salah satu destinasi wisatanya yaitu Desa Wisata B-29 yang berada di Desa Argosari, Kecamatan Senduro ini merupakan puncak tertinggi di kawasan lautan pasir Bromo dengan ketinggian 2.900 mdpl, yang berjarak sekitar 40 kilometer dari arah Kota Lumajang (Rofik, 2018). Kawasan Argosari ini memiliki pemandangan yang indah, pada saat perjalanan menuju ke Puncak B-29 terlihat perkebunan warga sekitar berupa tanaman sayuran seperti bawang merah, wortel, dan cabe. Perkebunan warga ini berbentuk terasering atau berbentuk petak miring menyesuaikan kontur tanah perbukitan. Di puncaknya sendiri yaitu Puncak B-29 akan disuguhkan dua *view* yang menakjubkan, hal ini dibuktikan bahwa pada saat sampai di puncak

B-29 terlihat perkebunan warga yang berbentuk seperti pegunungan Mahameru serta pemandangan awan tebal yang seolah membentuk negeri di atas awan dan membuat wisatawan takjub. Selain itu pemandangan lain yang disuguhkan oleh puncak B-29 ini yaitu pada saat *sunrise* dan *sunset*. Menurut RIPPDA Kabupaten Lumajang (2015) Puncak B-29 termasuk ke dalam klarifikasi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) kelas “A” yaitu kelas objek Wisata unggulan.

Potensi alam yang dimiliki Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa itu sendiri sebagai objek sekaligus juga sebagai subjek kepariwisataan. Dikatakan sebagai objek artinya kehidupan pedesaan merupakan tujuan utama bagi kegiatan wisata, sedangkan dikatakan sebagai subjek artinya bahwa desa yang memiliki segala aktivitas sosial dan budaya yang dimiliki dan apa yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Soebagjo (1991) peran masyarakat sendiri sangat memengaruhi kelangsungan kegiatan pariwisata pedesaan (dalam Hadiwijoyo, 2012).

Berdasarkan Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang (dalam Buku Data Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang 2016) menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa Jumlah pengunjung Wisata Puncak B-29 pada tahun 2016 yang terdiri dari wisatawan nusantara dengan jumlah 39.065 orang dan wisatawan mancanegara 356 orang. Kegiatan pariwisata di

Desa Wisata B-29 yang terletak di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ini, peran pemerintahnya sendiri sudah melakukan perbaikan dari sisi infrastruktur. Dikutip dari *antaranews.com* menurut Cak Thoriq selaku Bupati Lumajang menyatakan “Kami berharap dengan pembangunan infrastruktur jalan menuju puncak B-29 yang lebih baik, maka nantinya akan dapat menjadikannya sebagai destinasi wisata Negeri di Atas Awan unggulan Kabupaten Lumajang.” Perbaikan ini dilakukan karena pemerintah berharap agar wisatawan yang datang tidak kecewa. Namun, disisi lain partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini masih dinilai kurang atau masih belum maksimal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, partisipasi masyarakat masih kurang misalnya masalah aksesibilitas yang berkaitan dengan rendahnya kualitas pelayanan kepariwisataan, terutama penyedia jasa di Desa Wisata B-29 ini masih belum melakukan sapta pesona sepenuhnya misalnya dari segi bahasa, dan kerapian. Permasalahan selanjutnya yang terdapat di Desa Wisata B-29 yang terletak di Desa Argosari ini yaitu terkait atraksi wisata yang mana masih diperlukannya partisipasi masyarakat dalam menciptakan inovasi terkait atraksi wisata ini untuk menyeimbangkan kualitas maupun kuantitas kunjungan wisatawan ke Desa Wisata B-29 ini misalnya permasalahan yang sering dikeluhkan yaitu keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara, kemudian belum tersedianya tempat oleh-oleh yang menjadi ciri khas dari wisata B-29. Masyarakat Desa Argosari kawasan wisata B-29 juga masih mengalami hambatan dalam proses

partisipasi aktif misalnya dari motivasi masyarakat sendiri mereka masih terkendala dengan pekerjaan mereka (masyarakat Desa Argosari Kawasan Wisata B-29) yang notabenehnya masih berkebutuhan, sehingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara optimal. Dan masalah selanjutnya yang sering terjadi yaitu terkait dengan tarif ojek yang ada di Wisata B-29 ini, karena ada beberapa orang yang memberikan tarif tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

Dikutip dari *beritametro.news*, Menurut Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lumajang Romat Nur Khudori, pengunjung diharapkan melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada ojek – ojek yang ada di Kawasan Wisata B-29. Beliau mengungkapkan “Untuk harga ojek seperti yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang adalah 75 ribu (pulang pergi untuk tujuan B-29) dan Rp 100 ribu (pulang pergi untuk tujuan P-30).” Ungkap Khudori. Permasalahan empirik di atas merupakan masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Permasalahan di atas tidak mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat belum berperan aktif dalam pengembangan objek pariwisata, tetapi terlihat seolah membuat wisatawan merasa tidak nyaman.

Berdasarkan latar belakang di atas, terkait permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat Desa Wisata B-29 yang terletak di Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang itu sendiri juga akan memengaruhi wisatawan yang akan berkunjung jika permasalahan tersebut tidak segera diminimalisir. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai pengembangan wisata dengan mengambil judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”**.

I. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tahapan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang ?

I. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang

I. 4 Kontribusi Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis :

1. Kontribusi Akademis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan pemikiran di dalam menentukan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah.

2. Kontribusi Praktis

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan gambaran kepada pihak Pokdarwis selaku pengelola pariwisata B-29 guna meningkatkan konsistensi terhadap pengembangan wisata yang berbasis partisipasi masyarakat.

b. Dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai data atau pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan pariwisata yang berbasis partisipasi masyarakat.

I. 5 Sistematika Penulisan

Tujuan penyusunan sistematika ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan. Penulis mengacu pada sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan pariwisata Desa Wisata B-29. Bab ini juga berisi mengenai alasan penulis dalam memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini mengenai teori – teori dan konsep teoritis yang digunakan oleh penulis sebagai landasan dalam penulisan, pembahasan maupun identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian. Teori – teori dan konsep teoritis yang digunakan adalah buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan pariwisata Desa Wisata B-29.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian, di dalamnya terdapat data – data berupa data primer maupun data sekunder yang diperoleh peneliti pada saat terjun ke lapangan. Penyajian data disajikan sesuai dengan rumusan masalah dan berdasarkan fokus penelitian yang telah dibuat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari analisa berdasarkan penyajian data dan proses analisis dari fokus penelitian. Di dalam bab ini juga berisi saran dan masukan bagi permasalahan yang terjadi di lapangan, saran dan masukan ini tentunya bersifat konstruktif.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan acuan dan perbandingan. Selain itu, hal tersebut untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti mencantumkan hasil – hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Ni Luh Gede Ratnaningsih dan I Gusti Agung Oka Mahagangga (2015)

Penelitian dari Ni Luh Gede Ratnaningsih dan I Gusti Agung Oka Mahagangga (2015) yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata (Studi Kasus di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali)*”.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat lokal dalam pariwisata di Desa Belimbing, Tabanan, Bali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional. Hal ini dikarenakan, Desa Belimbing Tabanan Bali memiliki potensi alam yang menjanjikan jika dikelola dengan baik.

2. Hasil penelitian Nikita Amalia VGA, Andriani Kusumawati dan Luchman Hakim (2018)

Penelitian Nikita Amalia VGA, Andriani Kusumawati dan Luchman Hakim (2018) yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata serta Dampaknya terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu.*" Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk – bentuk partisipasi masyarakat Desa Tulungrejo dan menganalisis dampak negatif maupun positif dari pengembangan wisata bagi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tulungrejo telah berpartisipasi dalam kegiatan wisata dan sudah siap dalam industri pariwisata. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Tulungrejo beragam seperti partisipasi tenaga dan juga partisipasi harta. Dampak positif dari adanya pengembangan desa wisata di Desa Tulungrejo ini terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pendapatan tambahan bagi petani sekitar serta meningkatnya nilai jual apel.

3. Hasil Penelitian Josie Gerald Meray, Ir. Sonny Tilaar, dan Esli D. Takummansang (2016)

Penelitian Josie Gerald Meray, Ir. Sonny Tilaar, dan Esli D. Takummansang (2016) yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas*".

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini

bertujuan untuk mengidentifikasi tanggapan masyarakat terkait pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang Kecamatan kakas dan menganalisis bentuk – bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang Kecamatan kakas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa karakteristik masyarakat memengaruhi bentuk dan tingkatan partisipasi yang dilakukan masyarakat, hal tersebut berkaitan dengan mata pencaharian dan tingkat pendidikan. Tanggapan masyarakat terhadap pengembangan kawasan wisata dilihat dari peran sertanya dan dukungan pemerintah maupun wisatawan bernilai positif. Artinya, dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar lokasi wisata.

Tabel 2. Penelitian terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
Ni Luh Gede Ratnaningsih dan I Gusti Agung Oka Mahagangga, 2015	Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata (Studi Kasus di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali).	Partisipasi Masyarakat Lokal, dalam Pariwisata	Deskriptif Kualitatif	partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan dengan melalui pembinaan dan pelatihan.
Nikita Amalia VGA, Andriani Kusumawati	Partisipasi Masyarakat dalam	Partisipasi Masyarakat, dalam	Deskriptif Kualitatif	Partisipasi masyarakat Desa

Nama	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
dan Luchman Hakim, 2018	Pengembangan Desa Wisata serta Dampaknya terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu.	Pengembangan Desa Wisata serta Dampak terhadap perekonomian		Tulungrejo terhadap pengembangan desa wisata cukup tinggi, namun diperlukan pembaruan atraksi wisata secara berkala maupun dilakukan promosi yang lebih laus agar menarik minat masyarakat. dalam pengembangan wisata di Desa ini memiliki dampak positif yaitu perekonomian warga sekitar terutama petani apel mengalami peningkatan.
Josie Geraldny Meray, Ir. Sonny Tilaar, dan Esi D. Takummansang, 2016	Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas.	Partisipasi Masyarakat, terhadap pengembangan Pariwisata	Deskriptif Kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kawasan Wisata Pantai Mahembang cukup tinggi baik dari partisipasi insentif maupun interaktif, serta dengan adanya pengembangan

Nama	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
				wisata memiliki dampak positif bagi warga sekitar terhadap perekonomian mereka

II. 2 Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

II.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi dari Bahasa Inggris yaitu *administration* atau *to administear* yang berarti mengelola (*To manage*) atau menggerakkan (*to direct*). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat. Menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2013) mengatakan : “administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya suatu tujuan”.

J. M. Pfifner (dalam Makmur, 2003) menyatakan “*administration may be defined as the organisation and direction of human and material resources to achive desired ends*” (administrasi dapat diartikan sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber – sumber manusia dan material untuk mencapai tujuan – tujuan yang diinginkan). Sedangkan menurut H. A.

Simon (dalam Makmur, 2003) juga berpendapat bahwa “*administration s the activities of group cooperating to accomplish common goals*” (administrasi adalah merupakan aktivitas kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama). Kemudian Dimock dan Koenig dalam “*Public Administration*” yang dikutip oleh Makmur, 2003 mengartikan Administrasi Publik sebagai “*the activity of the state in the excercise of its political power.*”³⁾ kemudian J. M. Pfifner dan E. Presthus mengatakan Administrasi Publik iaalah : “*Public administration is a proces concerned with carying public out public policies.*” Kedua definisi tersebut menyebutkan administrasi publik yaitu pelaksanaan kekuasaan politik atau kebijakan publik. Kedua definisi tersebut menurut Makmur, jelas sekali menunjukkan peran khusus administrasi publik sebagai *pelaksana kebijakan politik*, sedang siapa yang merumuskannya bukan peran administrasi publik.

Administrasi publik ini digunakan untuk sebagai alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan tujuan pemerintah itu sendiri, salah satunya yaitu dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan berarti usaha mewujudkan cara aktual alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah (Makmur, 2003). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa pengertian di atas tentang administrasi publik yaitu dimana adanya kerja sama antara sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

II.2.2 Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu paradigma administrasi publik yang berkembang setelah ilmu administrasi publik. Menurut Kristiadi (1994) menjelaskan bahwa administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang mampu mendorong ke arah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian. Dilihat dari definisi di atas, oleh karenanya administrasi pembangunan sering dikaitkan dengan pendukung dari perencanaan dan implementasi. Sedangkan menurut Kartasmita (1997) administrasi pembangunan sangat penting dalam pengarahannya sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan perubahan.

Menurut Siagian (2007) administrasi pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh bangsa atau pemerintah sebagai suatu upaya menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Disini dapat dilihat bahwa konsep administrasi pembangunan sangat cocok diterapkan pada negara – negara berkembang. Sedangkan menurut Supardi (1994) menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur (dalam Pramudiarto 2018). Dari penjelasan mengenai pengertian administrasi pembangunan, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu proses terencana atau terstruktur yang dilakukan pemerintah

dengan bantuan masyarakat guna untuk memperbaiki suatu negara agar lebih baik lagi.

II. 3 Pariwisata

II.3.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan buka untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah (Suwantoro, 1997). Sedangkan menurut Bafadhal (2018) menyatakan bahwa pariwisata adalah serangkaian aktivitas sosial yang dilakukan oleh seorang atau kelompok wisatawan dalam mencapai tujuan perjalanan mereka melalui perpindahan sementara, ke dalam suatu sistem yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka serta menjadi bagian dari fenomena yang dihasilkan dari semua proses. Dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan serangkaian aktivitas sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di luar tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan mereka atau *refreshing*.

II.3.2 Jenis - Jenis Wisata

Pariwisata sendiri terdapat beberapa macam jenis yang diklasifikasikan.

Menurut Samsuridjal dan Kaelany HD (1996) ada beberapa jenis wisata

yaitu :

a. Wisata untuk rekreasi, merupakan jenis wisata yang bertujuan untuk memanfaatkan hari libur di luar rumah atau untuk mendapatkan suasana

baru agar menjadi segar sebelum kembali bertugas. Rekreasi sendiri dapat dilakukan untuk mengunjungi pantai, pegunungan dan lain sebagainya.

b. Wisata Bahari, merupakan jenis wisata yang memanfaatkan keindahan laut yang indah seperti laut yang biru atau *view* pantai yang indah. Adapun kegiatan yang biasanya berkaitan dengan wisata bahari ini seperti *diving* (menyelam), berlayar, memancing dan lain – lain.

c. Wisata Alam, merupakan jenis yang menarik dalam kegiatan petualangan, seperti bukit, gunung, gua – gua, sungai dan lain – lain. Wisata ini merupakan salah satu wisata yang mengundang berbagai risiko. Oleh karena itu, wisatawan yang tertarik dengan wisata alam harus memahami betul risiko – risiko yang berakibat fatal jika diabaikan.

d. Wisata Budaya, merupakan wisata yang banyak menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia karena di Indonesia terdapat berbagai macam budaya yang menarik dan unik.

e. Wisata olahraga, merupakan jenis wisata yang terdiri dari berbagai pertandingan olahraga baik yang bertingkat nasional maupun internasional. Wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri tertarik untuk menyaksikan pertandingan olahraga. Peristiwa – peristiwa yang berkaitan dengan wisata olahraga ini seperti adanya perebutan piala dunia dalam bidang olahraga bulu tangkis, tinju dan lain lain.

f. Wisata bisnis, merupakan jenis wisata yang berkaitan dengan peningkatan kebutuhan sarana penunjang bisnis. Perjalanan bisnis ini biasanya dilakukan oleh seseorang usahawan yang berkunjung ke suatu daerah atau

negara tertentu untuk membicarakan persoalan dagangannya dengan rekan dagang di daerah atau negara tersebut. Arus dagang ini terus melahirkan apa yang dinamakan wisata bisnis.

g. Wisata konvensional, merupakan jenis perjalanan wisata yang mana mereka datang atau berkunjung sebagai utusan perwakilan atau atas nama pribadi.

Banyak negara yang telah menyadari besarnya potensi ekonomi pariwisata jenis ini, oleh karenanya banyak negara yang berlomba – lomba untuk mengembangkan wisata konvensional ini.

II.3.3 Produk Pariwisata

Produk pariwisata salah satu hal yang terpenting dalam memperkuat wirausahawan pariwisata dalam perencanaan dan pengembangan bisnis pariwisata. Menurut Burns dan Holden (2000) dalam Bafadhal (2018) menyatakan bahwa produk pariwisata adalah segala sesuatu yang dapat dijual dan diproduksi dengan menggabungkan faktor produksi, konsumen yang tertarik pada tempat – tempat yang menarik, kebudayaan asli dan festival – festival kebudayaan. Kemudian Bafadhal (2018) menambahkan bahwa produk wisata dimulai dari ketersediaan sumber yang terwujud (*tangible*) hingga tak berwujud (*intangible*) dan menurutnya secara totalitas lebih condong ke arah kategori jasa yang tak berwujud (*intangible*).

Secara umum Bafadhal (2018) menyatakan bahwa produk pariwisata itu terdiri dari berbagai jenis jasa yang saling berintegrasi dan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Jasa Penyelenggaraan Pariwisata, meliputi : a) Jasa Biro Perjalanan Wisata, b) Jasa Agen Perjalanan Wisata, c) Jasa Pramuwisata, d) Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran, e) Jasa Penyelenggara Rekreasi dan Hiburan, f) Jasa Konsultan Pariwisata, g) Jasa Informasi Pariwisata.
2. Jasa Wirausahawan Objek Dan Daya Tarik Wisata, meliputi : a) Wirausahawan Objek Dan Daya Tarik Wisata Alam, b) Wirausahawan Objek Dan Daya Tarik Wisata Budaya, c) Wirausahawan Objek Dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
3. Jasa Penyediaan Sarana Pariwisata, meliputi : a) Penyediaan Akomodasi, b) Penyediaan Makan dan Minum, c) Penyediaan Transportasi Wisata, d) Penyediaan Sarana Wisata Tirta, e) Penyedia Spa, f) Penyelenggaraan Kawasan Pariwisata.
4. Usaha Pendukung Pariwisata, meliputi : a) Sarana, b) Prasarana, c) Infrastruktur, d) Fasilitas.

Setiap produk wisata yang ditawarkan kepada wisatawan tersebut dapat terdiri dari tiga tingkat produk wisata yaitu produk inti, produk formal, dan produk tambahan (Kotler, Bowen *and* Makens (2010) dalam Bafadhal (2018).

II.3.4 Sapta Pesona Pariwisata

Sapta pesona adalah salah satu unsur terpenting dalam mengembangkan objek pariwisata. Citra dan mutu pariwisata itu ditentukan oleh keberhasilan dalam perwujudan sapta pesona daerah tersebut. Sapta pesona merupakan

tujuh kondisi yang harus diwujudkan dan dibudayakan dalam kehidupan masyarakat sehari – hari sebagai salah satu upaya untuk memperbesar daya tarik dan daya saing pariwisata Indonesia, adapun unsur – unsur dalam sapta pesona tersebut adalah : (Pramudiarto, 2018)

- a. Keamanan adalah suatu kondisi dimana wisatawan dapat merasa aman, terlindungi yang artinya berkaitan dengan jiwa dan fisik.
- b. Ketertiban adalah kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas, teratur, rapi serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segi kehidupan masyarakat.
- c. Kebersihan suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah penyakit dan pencemaran.
- d. Kesejukan adalah keadaan dimana memberikan suasana sejuk, nyaman, rapi, tenang dan adanya penghijauan.
- e. Keindahan adalah keadaan atau menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap dipandang mata.
- f. Keramah tamahan adalah suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan santun, suka tersenyum, ramah dan menarik hati.
- g. Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya.

Sapta pesona dapat diwujudkan dengan memberikan pengertian kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha, bahwa sapta pesona merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam mengembangkan suatu objek wisata.

II.3.5 Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Menurut Garrod (2001), ada dua pendekatan yang berkaitan dengan penerapan prinsip – prinsip perencanaan dalam konteks pariwisata. Pendekatan pertama, cenderung dikaitkan dengan 15 aktor perencanaan formal yang sangat menekankan pada keuntungan potensial dari ekowisata. Perencanaan kedua, cenderung mengarah pada perencanaan yang partisipatif yang lebih fokus dengan ketentuan dan pengaturan yang lebih seimbang antara pembangunan dan perencanaan yang terkendali. Pendekatan ini lebih menekankan pada kepekaan terhadap lingkungan alam dalam dampak pembangunan ekowisata. Perencanaan pembangunan yang partisipatif dalam pariwisata salah satunya dapat menerapkan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pendekatan pembangunan.

Community Based Tourism (CBT) menurut Suansri (2003) didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, dan budaya. CBT merupakan alat yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karenanya, CBT berkaitan erat dengan adanya partisipasi masyarakat lokal. Menurut Hudson (dalam Timothy, 1999) CBT memiliki ciri-ciri khusus yaitu berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki minat, serta memiliki kontrol besar dalam proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan.

II. 4 Partisipasi Masyarakat

II.4.1 Peran Masyarakat

Peran sendiri menurut Soekanto (1990) merupakan satu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu seseorang melakukan tindakan atau gerak perubahan dinamis dari usaha itu yang nantinya diharapkan akan terciptanya suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui kewenangan, kekuasaan, dan fasilitas yang dimiliki. Masyarakat sendiri diartikan sebagai pelaku yang mana dapat melakukan suatu perubahan. Pelaku dari perubahan sendiri memiliki peranan yang penting dalam pembangunan atau pengembangan pariwisata, hal ini dikarenakan peran dari masyarakat sangat penting karena masyarakat dinilai lebih mudah untuk melakukan sesuatu perubahan apabila ada yang mengawali terlebih dahulu. Peran masyarakat dalam pengembangan wisata sangat penting.

Menurut Suwantoro (1997) peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata ada dua aspek yaitu dapat berperan aktif ataupun berperan pasif. Berperan aktif artinya dilaksanakan secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama – sama, yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kreasi mau melibatkan diri dalam kegiatan pengusaha pariwisata alam atau melalui pembinaan rasa ikut memiliki dikalangan masyarakat. Sedangkan peran pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan – kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam pariwisata.

III.4.2 Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan maupun peran serta (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan”. Menurut Sumarto (2003) partisipasi masyarakat atau partisipasi warga merupakan proses ketika masyarakat atau warga sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran atau ikut serta dalam memengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung memengaruhi kehidupan mereka.

Priasiasa (2011) dalam penelitiannya yang dilakukan di Phuket, Thailand tahun 2008 terkait implementasi *community based tourism* (pariwisata berbasis komunitas), dia melihat bahwa pemerintah setempat sudah tidak ikut mengatur dalam pengembangan atau pembangunan wisata, dimana pengaturan diserahkan kepada masyarakat setempat baik dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, implementasi maupun pengawasan. Sedangkan pemerintah dan pelaku pariwisata hanya bertindak sebagai mitra kerja. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata

dapat diartikan sebagai partisipasi. Prasiasa (2011) menyebutkan ada lima tahap dalam partisipasi masyarakat :

1. **Tahap Persiapan.** Partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan ini

adalah dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk memahami bagaimana pengembangan wisata.

2. **Tahap Perencanaan.** Pada tahap ini, terdiri dari dua klasifikasi

yaitu identifikasi kebutuhan dan analisis kemampuan. Dalam tahap ini, partisipasi masyarakat bersifat fungsional, artinya masyarakat setempat diharapkan mampu berpartisipasi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh tenaga ahli yang berasal dari luar desa setempat yang sudah diberi kepercayaan dalam melakukan atau melaksanakan pengembangan pariwisata.

3. **Tahap Operasional.** Tahap ini, terdiri atas partisipasi berbentuk

fisik dan partisipasi berbentuk nonfisik. Partisipasi berbentuk fisik ini, dimana partisipasi masyarakat setempat dapat melakukan partisipasi dengan cara kontribusi masyarakat dalam melakukan suatu pengembangan semisal membangun pos – pos yang digunakan sebagai tempat ojek. Sedangkan partisipasi non fisik, adalah dimana masyarakat ikut melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik, semisal mempelajari bahasa – bahasa asing, mempelajari bagaimana cara menjadi pramuwisata yang baik dan lain – lain.

4. **Tahap Pengembangan.** Pada tahap ini partisipasi masyarakat

bersifat spontan, artinya disini masyarakat dengan kemauannya

sendiri mendirikan atau mengelola usaha – usaha semisal yang berkaitan dengan oleh – oleh khas desa tersebut.

5. **Tahap Pengawasan.** Pada tahap ini, partisipasi masyarakat lebih ke arah pengawasan yang bersifat praktis dan preventif untuk menjaga atau mencegah desa tempat wisata agar tidak tercemar oleh tindakan – tindakan yang negatif.

b. Jenis - jenis Partisipasi

Davis sebagaimana yang dikutip (Sastropetro, 1988) mengemukakan jenis partisipasi sebagai berikut :

1. Pikiran (*psychological participation*), artinya partisipasi ini terkait jenis keikutsertaan secara aktif dengan mengarahkan pikiran dalam suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Tenaga (*physical participation*) adalah partisipasi yang mana mengarah pada aktifitas fisik atau tenaga dari individu atau kelompok.
3. Keahlian
4. Barang
5. Uang

Partisipasi masyarakat penting dalam pengembangan pariwisata yang salah satunya wisata B-29 karena yang mengetahui lebih detail dan paham tentang lokasinya adalah masyarakat.

Pemerintah boleh melakukan perubahan – perubahan dalam memperbaiki infrastruktur namun, pemerintah juga harus bisa memberikan peluang bagi masyarakat itu sendiri dengan cara berkoordinasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata yaitu sebagai makhluk sosial yang mana masyarakat atau manusia disini dinilai sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mana mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan (Sunaryo, 2013). Dalam hal untuk mengembangkan pariwisata alam di suatu daerah mutlak diperlukan kerja sama dengan masyarakat sekitar. Berdasarkan Undang – Undang no. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata digolongkan berdasarkan institusinya, yaitu : a) Institusi Pemerintah, b) Institusi Swasta/Industri, dan c) Masyarakat. Artinya dalam pengembangan pariwisata pemerintah pusat juga harus membangun kerja sama yang baik dengan swasta, pemerintah setempat, maupun masyarakat daerah sekitar. Dimana nantinya kerja sama ini dapat menciptakan pengelolaan secara profesional dengan mutu pelayanan yang memadai.

III.4.3 Teori *Ladder Of Citizen Participation*

Partisipasi masyarakat dapat dilihat atau dinilai dengan menggunakan tangga partisipasi. Menurut Arnstein (1969) partisipasi masyarakat didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan "*corresponding to the extent of citizen's*

power in determining the plan and/or program.” Secara umum model ini memiliki tiga derajat partisipasi :

- a. Tidak Partisipatif (*Non Participation*)
- b. Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*)
- c. Kekuatan Masyarakat (*Degrees of Citizen Power*)

Tabel 3. Level Partisipasi menurut Arnstein

8	Kendali Warga (<i>citizen control</i>)	Derajat Kuasa/Kekuatan Masyarakat (<i>Degree of Citizen power</i>)
7	Kuasa yang di delegasi (<i>delegated power</i>)	
6	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Partisipasi semu (<i>Tokenism</i>)
5	Penempatan (<i>Placation</i>)	
4	Konsultasi (<i>consultation</i>)	
3	Pemberian Informasi (<i>Informing</i>)	Tidak Partisipatif (<i>Non Participation</i>)
2	Terapi (<i>therapy</i>)	
1	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	

Sumber: Sherry R Arnstein, "A ladder of Citizen Participation" (*JAPA* 1969). (Olahan Penulis 2020)

Dua tangga terbawah dikategorikan dalam tingkatan Non Partisipasi (*non participation*) yang telah dibuat oleh beberapa orang untuk menggantikan partisipasi asli. Dalam dua tangga terbawah tersebut menempatkan bentuk – bentuk partisipasi Manipulasi (*manipulation*) dan Terapi (*therapy*) dalam kedua tangga tersebut bertujuan untuk mendidik

masyarakat atau “menyembuhkan” masyarakat. Tangga pertama manipulasi bisa diartikan (relative) tidak ada komunikasi ataupun dialog sedangkan dalam tangga kedua *Therapy* diartikan sudah adanya komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemegang kekuasaan (pemerintah) dan hanya satu arah.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan “*degree of tokenism*” (partisipasi semu) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat dan tidak ada jaminan untuk mempertahankan status quo. tangga ketiga (*information*) menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah dan kemungkinan tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukan timbal balik. Tangga keempat (*consultation*) berarti bahwa komunikasi telah bersifat dua arah namun masih bersifat partisipasi yang formalitas. Tangga kelima yaitu (*Placation*) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan masyarakat sudah boleh melakukan negosiasi dengan penguasa (pemerintah) dalam memberikan masukan secara lebih signifikan, namun untuk penentuan hasil kebijakan atau pengambilan keputusan masih dipegang oleh penguasa (pemerintah).

Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai (*degree of citizen power*) dimana masyarakat sudah mengalami peningkatan dalam pengambilan

keputusan baik itu dari penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kerja sama/kemitraan (*partnership*) yaitu masyarakat sudah mampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar. Pada tangga ketujuh yaitu pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) mensiratkan bahwa masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai” dan pada tangga kedelapan kendali warga (*citizen control*) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu.

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) terlihat bahwa di dalamnya digambarkan bagaimana bentuk – bentuk partisipasi masyarakat dari masyarakat yang dipaksa atau dimanipulasi dan dimana masyarakat mampu mengontrol pembuatan keputusan serta pengalokasian sumber daya. Kemudian masing – masing tingkatan ditekankan bukan dari seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau putusan program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut.

III.4.4 Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang ideal tentunya muncul dikarenakan masyarakat ikut andil dalam melaksanakan program – program yang dibuat

pemerintah namun, disisi lain partisipasi masyarakat itu tidak timbul begitu saja tetapi adanya dorongan pihak yang terkait misalnya pemerintah.

Partisipasi masyarakat sendiri muncul dikarenakan adanya program – program yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat sendiri. Tentunya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pasti ada faktor – faktor yang mendukung atau menghambat. Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program.

Dalam hal ini menurut Dorojatin (dalam Slamet 2003;13) ada tiga faktor pendorong partisipasi masyarakat, yaitu : 1) kemauan masyarakat, 2) kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi, 3) sosialisasi.

Faktor pendukung lain dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam berpartisipasi. Menurut Balkis (2018) penguatan partisipasi sendiri dapat berupa pelatihan penguatan kapasitas kepala desa atau kepada rukun tetangga yang memberi dampak kepada peningkatan pengetahuan Lembaga Kemasyarakatan sebagai wakil rakyat. Masyarakat sangat dipercaya untuk memiliki andil dan pengetahuan sepenuhnya dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Menurut Adisasmita 2006 (dalam Balkis 2018) menyatakan bahwa :

1. Mereka sesungguhnya memahai tentang keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakatnya.
2. Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
3. Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat.

4. Mereka mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pembangunan masyarakatnya.
5. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berlandaskan kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar kebergantungan terhadap pihak luar.

Penguatan partisipasi masyarakat sendiri dapat dilakukan dengan melalui pendekatan *stakeholder* dalam usaha pembangunan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan pendekatan *stakeholder* agar masyarakat lebih mengerti dan memahami aspirasi – aspirasi masyarakat dan nantinya masyarakat secara sadar turut berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk menarik perhatian masyarakat pemerintah nantinya harus lebih memahami perilaku dari masyarakat terlebih dahulu, dan melibatkan peran masyarakat dalam membuat ide – ide baru khususnya dalam pengembangan pariwisata. Dengan adanya peran dari masyarakat itu sendiri nantinya agar masyarakat tidak mempunyai pikiran – pikiran negatif bahwa pemerintah membuat suatu kebijakan atau program bukan untuk kepentingannya sendiri melainkan demi kepentingan bersama dan masyarakat dijadikan sebagai subjek yang berkepentingan dan berkompetensi (Balkis, 2018).

III.4.5 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Program – program pembangunan tentunya tidak semua yang dibuat oleh pemerintah diterima langsung oleh masyarakat atau sering dikatakan kurang mendapat respon positif. Misalnya masyarakat kurang diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam membuat suatu program atau membuat ide – ide baru untuk pembangunan. Peran serta dari masyarakat

sendiri merupakan hak setiap masyarakat. Jika masyarakat tidak diikutsertakan atau tidak turut andil dalam pembangunan, nantinya akan membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan dalam memperbaiki mutu hidupnya.

Faktor penghambat biasanya terjadi dikarenakan adanya penolakan secara internal di kalangan masyarakat. Menurut Slamet (dalam Erawati dan Mussadun, 2013) secara teoritis tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri – ciri sosiologis, misalnya faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lamanya menjadi anggota masyarakat setempat.

Peran serta masyarakat dalam berpartisipasi merupakan hak dari setiap masyarakat, jika masyarakat tidak terlibat maka tidak mungkin pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Menurut Mikkelsen 2003 (dalam Balkis 2018:37), rendahnya partisipasi masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat dan penolakan secara eksternal terhadap pemerintah
- b. Kurangnya dana
- c. Terbatasnya informasi, pengetahuan atau pendidikan masyarakat, dan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat jika dilihat dari pendapat dua ahli di atas itu sangatlah penting, karena faktor –

faktor tersebut dapat digunakan untuk melihat bagaimana memposisikan masyarakat sebagai *Agent of Change*. Apabila ingin meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pengembangan partisipasi maka dapat dilihat dulu apa yang menjadi pendukung maupun penghambat jika ingin meningkatkan partisipasi masyarakat.

II. 5 Pengembangan Pariwisata

II.5.1 Definisi Pengembangan Pariwisata

Musanet 1995 mengartikan bahwa pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan serta menyediakan semua sarana maupun prasarana, baik berupa jasa, barang atau fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan (dalam Kastolani, 2018). Sedangkan menurut Paturusi 2001 (dalam Firdausya, 2017:23) mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu strategi yang digunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata maupun pemerintah.

Pengembangan pariwisata memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan baik itu bagi wisatawan maupun komunitas (tuan rumah). Dengan adanya pengembangan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Pengembangan pariwisata bisa melalui perbaikan fasilitas infrastruktur, wisatawan, dan penduduk setempat saling diuntungkan. Disisi lain, pengembangan pariwisata juga harus

memperhatikan beberapa aspek - aspek, seperti : aspek budaya, aspek sejarah, maupun aspek ekonomi di kawasan wisata.

Pitana dan Diarta (2009) menyebutkan bahwa strategi dalam pengembangan pariwisata harus mampu menggabungkan aspek – aspek penunjang kesuksesan dunia pariwisata. Aspek – aspek tersebut adalah aspek transportasi dan saluran pemasaran, infrastruktur, interaksi sosial dan keterkaitan dengan sektor lain. Pengembangan merupakan proses atau aktivitas yang bertujuan untuk memajukan sesuatu yang dianggap perlu untuk ditata sedemikian rupa dengan meremajakan atau memelihara yang sudah berkembang agar menjadi lebih menarik dan berkembang. Hasibuan (2003) menyatakan bahwa pengembangan (*development*) adalah suatu usaha yang meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Suwanto (2004) menjelaskan pengembangan sebagai suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi lebih maju, baik, sempurna maupun berguna.

Menurut Spillane (1994) mengatakan bahwa dalam pengembangan suatu objek wisata sebagai daerah tujuan wisata (*destination*), harus memperhatikan lima unsur penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanan wisatanya, lima unsur destinasi wisata tersebut meliputi : (dalam Amalia, Nikita dkk. 2018)

- a. Daya tarik wisata dan atraksi wisata yang mampu menarik pengunjung
- b. Fasilitas yang dapat mendukung kebutuhan dan keperluan wisatawan
- c. Infrastruktur dasar yang tersedia untuk kebutuhan wisatawan
- d. Transportasi menunjang dan mendukung mobilisasi wisatawan
- e. Keramah tamahan masyarakat lokal wisatawan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan menurut para ahli di atas merupakan suatu proses meningkatnya sesuatu menjadi lebih maju, baik, sempurna dan berguna. Namun, juga harus dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Di sisi lain, pengembangan pariwisata juga perlu dilakukan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata. Menurut Sunaryo (2013), Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata adalah semua orang yang berkecimpung dan atau menyumbangkan tenaga dan pikirannya pada seluruh potensi yang terkandung di dalam usaha pariwisata demi tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

II.5.2 Upaya Pengembangan Pariwisata

Soebagyo (2012) mengatakan pengembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : (dalam Firdausya, 2017:24)

- a. Pengelola pariwisata melibatkan masyarakat

Dalam mengelola pariwisata sebaiknya melihat dampak yang ditimbulkan dari wisata itu terlebih dahulu, sehingga dapat mengetahui

apakah wisata tersebut memberikan kontribusi terhadap masyarakat setempat yang lokasinya dekat dengan tempat wisata dan mampu memberikan peningkatan perekonomian terhadap masyarakat setempat.

b. Kegiatan promosi yang dilakukan harus beragam

Kegiatan promosi ialah suatu kegiatan yang penting dalam mengembangkan tempat wisata. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan suatu tempat wisata agar dikenal lebih luas. Kegiatan tersebut dapat berupa program – program kerja maupun program yang berkaitan dengan kegiatan promosi dengan memanfaatkan sistem informasi serta melakukan kerja sama dengan pusat – pusat informasi pariwisata.

c. Pemerintah pusat membangun kerja sama dengan kalangan swasta dan pemerintah setempat

Membangun kerja sama dengan menerapkan sistem yang jujur, terbuka dan profesional dengan mutu pelayanan yang memadai. Disisi lain kerja sama dengan penyelenggara juga dibangun agar lebih mudah dalam mengembangkannya. Kerja sama dengan agen biro perjalanan, penyelenggara tempat wisata, pengusaha jasa akomodasi dan komponen – komponen terkait lainnya juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pariwisata.

d. Mendorong masyarakat untuk berperan dalam kegiatan yang menguntungkan secara ekonomi

Masyarakat sekitar lebih di ajak untuk lebih menyadari peran, fungsi, manfaat pariwisata serta merangsang mereka agar lebih baik dalam memanfaatkan peluang – peluang yang tercipta dari berbagai kegiatan yang nantinya dapat menguntungkan secara ekonomi. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk memasarkan produk – produk lokal serta membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengadaan modal bagi usaha – usaha yang mendatangkan keuntungan.

e. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran pariwisata

Pengadaan sarana dan prasarana, perbaikan jalan, angkutan, pusat perbelanjaan wisata dan fasilitas lain si sekitar lokasi wisata sangat diperlukan. Dimana hal tersebut digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan pengunjung sehingga dapat memperoleh kepuasan dari pengunjung yang datang ke tempat wisata.

Dari lima point upaya pengembangan wisata yang dikemukakan oleh Soebagyo (2012) di atas sangat diperlukan yang mana nantinya akan memudahkan *stakeholder* dalam mengembangkan pariwisata yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

III. 1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi yang digunakan penulis untuk meneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Mardalis (dalam Pramudiarto, 2018) “penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi – kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.”

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2013) penelitian kualitatif adalah metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan cara – cara penting, seperti mengajukan pertanyaan – pertanyaan dan prosedur – prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara deduktif mulai dari tema – tema yang umum ke tema – tema khusus, dan menafsirkan makna data. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy (2011) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan – tulisan atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.

Creswell (2013) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama – sama, selain itu itu juga melibatkan pengumpulan data yang terbuka pula yang didasarkan pada pertanyaan – pertanyaan umum, dan analisis informasi dari partisipan. Dalam analisis jenis kualitatif ini, Dilaporkan dalam artikel – artikel jurnal dan buku buku ilmiah yang sering kali menjadi rujukan atau model analisis yang umum digunakan.

Penelitian ini menekankan pada proses pengumpulan data yang diamati oleh peneliti baik secara lisan maupun tulisan. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif ini dipilih dan digunakan karena penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan suatu gambaran ilmiah yang menjelaskan suatu fenomena atau fakta dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Argosari Kabupaten Lumajang yang ada di lapangan dan kemudian diambil sebuah kesimpulan.

III. 2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah penelitian. Tujuan dalam menentukan fokus penelitian ini adalah untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti agar penelitian nantinya tidak akan meluas ke hal yang tidak berkaitan. Menurut Moleong (2014) terdapat dua tujuan dalam penentuan fokus penelitian, yaitu: penetapan fokus dapat membatasi studi dan penetapan fokus

berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk keluarnya suatu informasi yang diperoleh dari lapangan.

Pada dasarnya dalam menentukan fokus penelitian dapat ditentukan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, meskipun nantinya fokus akan berkurang/berubah sesuai kondisi yang ditemui di lapangan. Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya oleh peneliti, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, menurut Priasiasa (2011) dalam penelitiannya yang dilakukan di Phuket, Thailand tahun 2008 terkait implementasi *community based tourism* (pariwisata berbasis komunitas), dia melihat bahwa pemerintah setempat sudah tidak ikut mengatur dalam pengembangan atau pembangunan wisata, pemerintah dan pelaku wisata hanya bertindak sebagai mitra kerja keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai partisipasi. Prasiassa (2011) menyebutkan ada 5 (lima) tahap partisipasi dalam partisipasi masyarakat :

- a. Tahap persiapan,
- b. Tahap perencanaan,
- c. Tahap operasional,
- d. Tahap pengembangan, dan
- e. Tahap pengawasan.

2. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

a. Faktor Pendukung

b. Faktor Penghambat

III. 3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau kawasan yang dijadikan objek dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kabupaten Lumajang. Dengan berbagai pertimbangan peneliti memilih lokasi penelitian tepatnya di Kecamatan Senduro khususnya di Desa Argosari. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena, desa ini memiliki potensi pariwisata yang sangat indah serta pemerintah sudah melakukan banyak strategi dalam pengembangan wisata ini. Namun, di lain sisi yang kurang mendukung adalah masyarakatnya dimana masyarakat masih belum maksimal dan memahami bagaimana cara berpartisipasi dalam mengembangkan tempat wisata ini.

Situs penelitian yang ditentukan dengan tujuan untuk memudahkan penetapan lokus agar tidak meluas, dan peneliti dapat mendapatkan data informasi yang valid serta relevan guna menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti. Adapun situs penelitian yang dipilih penulis adalah :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang terletak di Kawasan Wonorejo Terpadu Lumajang, Kedungjajang, Krajan, Wonorejo, Kabupaten Lumajang
2. Desa Argosari Kawasan Wisata B-29

III. 4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Loflan (1987) dalam Moleong (2014), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain. Jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Sedangkan data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitiannya (Pasolong, 2012).

III.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung pada saat berada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini sumber didapat melalui :

- a. Bagian Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
- b. Pengelola Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
- c. Koordinator Paguyuban Ojek Wisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

- d. Ketua Kelompok Sadar Wisata B-29
- e. Perwakilan Masyarakat

III.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer yang bersumber dari dokumen – dokumen atau arsip – arsip yang berkaitan dengan tema penelitian antara lain :

- a. Peraturan Bupati Lumajang
- b. RIPPDA Kabupaten Lumajang 2015
- c. Dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata oleh dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lumajang.
- d. Dokumen BPS Lumajang dalam Angka 2019

III. 5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data – data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, dilakukan teknik pengumpulan data penelitian data penelitian yang terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*), yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur untuk mendapatkan informasi dari para informan. Artinya sebelum melakukan

wawancara peneliti membuat pedoman pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian agar pada saat wawancara tidak keluar dari konteks yang dibahas atau dibicarakan.

2. Pengamatan (observasi) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati secara langsung fenomena atau objek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari wawancara. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung kegiatan dan rutinitas masyarakat sekitar wisata B-29 di Argosari kecamatan senduro Kabupaten Lumajang.
3. Dokumentasi menurut Herdiansyah (2011) adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi disini bisa berupa foto – foto gambar atau dokumen tertulis terkait aktivitas atau rutinitas masyarakat sekitar wisata B-29 di Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

III. 6 Instrumen Penelitian

Menurut Nasutin dalam Sugiyono (2012), penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya, bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan. Itu

semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu.

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Sugiyono (2012) menyampaikan bahwa peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi, wawancara pada sumber data dan objek yang diteliti serta untuk mendapatkan data dari dokumen yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Pedoman sebelum melakukan wawancara. Pedoman tersebut digunakan sebagai pedoman bagi peneliti ketika mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada informan agar data yang diperoleh lebih akurat.

3. Perangkat penunjang

Peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan dalam proses penelitian (*handphone* dan kamera).

III. 7 Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penulisan atau penelitian ketika seluruh data telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Creswell. Creswell menjelaskan (2014) menjelaskan :

“analisis data merupakan proses yang terus berkelanjutan selama penelitian. Analisis ini melibatkan analisis informasi partisipan, dan peneliti biasanya menerapkan langkah analisis umum dan strategi khusus di dalamnya. Langkah umum ini meliputi antara lain: pengolahan dan penyiapan data, pembacaan awal informasi, pengkodean data, deskripsi detail kode – kode, analisis tematik kode, penggunaan program komputer, penyajian data dalam tabel, grafik, gambar, serta interpretasi terhadap data penelitian.”

Data yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan topik kajian. Kemudian, dilakukan penyusunan karya tulis ilmiah berdasarkan data yang telah diperoleh dan dideskripsikan secara logis dan sistematis.

Model analisis data ini yaitu interaktif. Menurut Creswell (2012) langkah – langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah ini, melibatkan transkrip wawancara, men – *scanning* materi, mengetik data lapangan, dan menyusun data tersebut kedalam jenis – jenis yang berbeda tergantung dari sumber informasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan transkrip wawancara terhadap informan.

2. Membaca keseluruhan data

Langkah ini, membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Dalam penelitian ini,

peneliti membaca data – data yang diperoleh dari lapangan. Setelah data diorganisir hasilnya nanti akan dimaknai secara keseluruhan, dalam proses ini peneliti membuat catatan di bagian tepi. Catatan kecil yang yang berupa frasa pendek, ide atau konsep penting yang muncul dalam pikiran analis.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng – *coding* data

Coding merupakan proses mengubah materi atau informasi menjadi segmen – segmen tulisan sebelum memaknainya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *coding* data berdasarkan fokus yang telah ditetapkan agar memudahkan peneliti dalam menyajikan data.

4. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang –

orang, kategori – kategori, dan tema – tema yang akan dianalisis.

Pada tahap ini, peneliti membuat kode – kode untuk mendeskripsikan semua informasi, lalu menganalisisnya. Kemudian menerapkan proses *coding* untuk membuat sejumlah tema kecil atau kategori. Dalam penelitian ini, peneliti membuat deskripsi secara detail, mengembangkan tema dan memberikan penafsiran menurut sudut pandang peneliti.

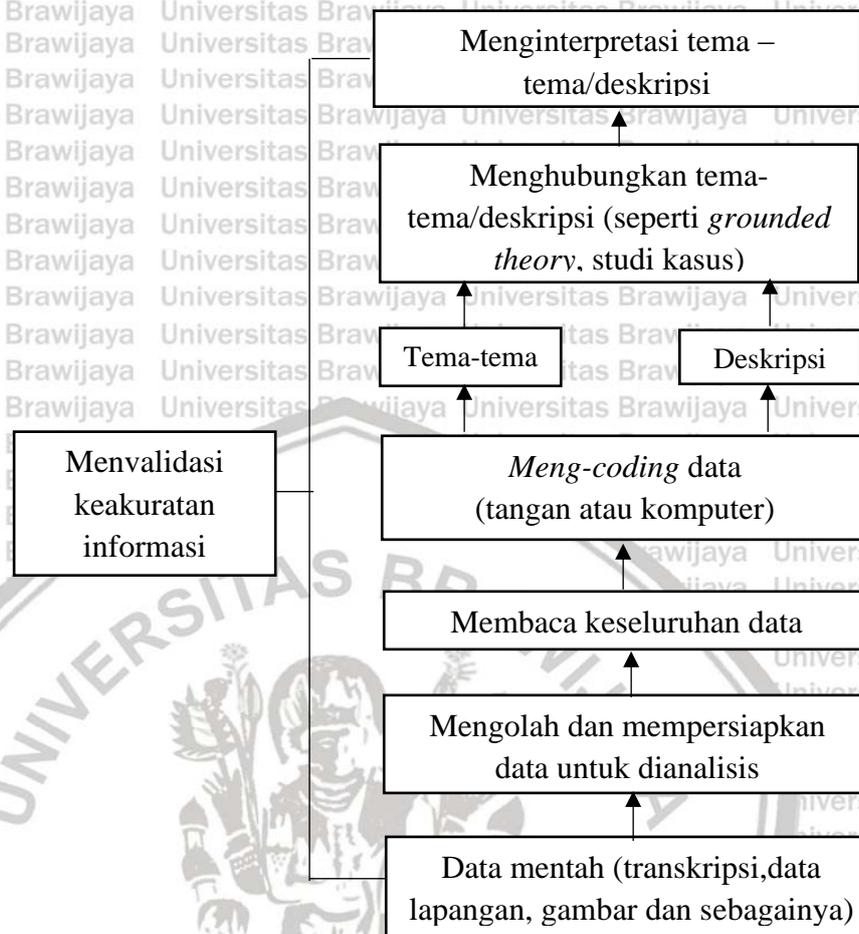
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema – tema ini akan disajikan kembali dalam laporan kualitatif.

Tahap ini lebih menerapkan pendekatan naratif. Pendekatan naratif bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema – tema tertentu

atau tentang keterkaitan antar tema. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan tema dimulai dengan memilah data, mereduksinya menjadi serangkaian tema kecil yang dapat dikelola dan menulisnya menjadi narasi akhir.

6. Menginterpretasi atau memaknai data

Interpretasi sendiri dapat berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari sumber literatur atau teori. Proses ini, dimulai dengan pengembangan kode, pembentukan tema, dari kode tersebut, dan dilanjutkan dengan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk memaknai suatu data. Dalam penelitian ini, peneliti menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan dan membandingkan data tersebut dengan teori konsep partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.



Gambar 1. Tahapan atau alur analisis data
Sumber: cresswell 2013

III. 8 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Menurut Moleong (2011) untuk mencapai suatu keabsahan data yang baik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kepercayaan (*kredibility*)

Kriteria ini ditandai dengan dilaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat kepercayaan peneliti dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan

jalan pembuktian oleh peneliti. Artinya, bahwa tujuan peneliti kualitatif ialah mendeskripsikan dan memahami fenomena yang menarik dari sudut pandang partisipasi. Derajat kepercayaan ini, dilakukan oleh peneliti dengan mencari narasumber yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan ini merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan ini, hendaknya seorang peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Peneliti disini, bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Sehingga dalam menguji keabsahan data secara keteralihan ini, peneliti menghubungkan antara satu narasumber dengan narasumber lainnya yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Uji kebergantungan atau depenbilitas ini dilakukan dengan melaksanakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal tersebut dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing yang melakukan audit terhadap keseluruhan aktivitas peneliti. Jika seorang peneliti tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka

dependabilitas penelitiannya patut untuk diragukan (Sugiyono, 2012).

Oleh karena itu, diperlukan audit atau pemeriksaan terhadap karya ini secara cermat dan berkala. Auditor dalam penelitian ini yaitu dosen pembimbing Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., M. dan Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA

4. Kepastian (*confirmability*)

Kriteria kepastian atau conformabilitas ini, bisa disebut juga sebagai objektivitas yang merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dan dapat dikonfirmasi oleh peneliti. Peneliti disini, mendokumentasikan prosedur untuk mengecek kembali seluruh data yang dilakukan oleh peneliti. Tahapan ini, merupakan tahap konfirmasi data yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian hasil dari pengecekan tersebut didiskusikan dengan dosen pembimbing dan diberikan arahan atau kepastian bahwasannya penelitian ini telah berjalan dengan baik dan benar. Seperti yang diungkapkan Moleong (2011) bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakat oleh beberapa orang atau banyak orang, baru dikatakan objektif. Jika sesuatu itu objektif berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Maka penelitian alamiah menghendaki adanya penekanan bukan pada orangnya melainkan pada datanya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

IV.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Fisik Geografis Kabupaten Lumajang

Otonomi daerah dimulai dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mana pada undang – undang tersebut membahas bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur pemerintahannya. Pemberian wewenang yang lebih luas ini ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan serta karakteristik daerah tersebut.

Demikian pula dengan yang terjadi di Kabupaten Lumajang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pada bagian gambaran umum kondisi daerah diuraikan tentang kondisi geografi dan demografi serta capaian indikator catatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten lumajang. analisis gambaran umum ini

memberikan pemahaman terkait data awal kondisi wilayah dan keberhasilan pembangunan Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah yang berada di Jawa Timur. Kabupaten ini berjarak 145 Km dari arah Ibu Kota Jawa Timur yaitu Surabaya. Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.790,90 km², dimana kabupaten ini dibagi menjadi 21 kecamatan, 195 desa, dan 7 kelurahan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang.

Secara geografis, Kabupaten Lumajang terletak pada posisi 112°-53' – 113°-23' Bujur Timur dan 7°-54' – 8° Lintang Selatan. Kabupaten ini beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2599 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24°C – 32°C.

Kabupaten Lumajang memiliki kawasan lereng Gunung Semeru, salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, yang berada di atas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperatur terendah mencapai 5°C. Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sampai dengan juni 2016 adalah sebesar 1.104.759 jiwa.

Kabupaten Lumajang juga memiliki potensi hidrografi yang sangat menjanjikan disektor sumber air minum, irigasi, maupun

pariwisata. Ada 31 sungai mengalir di kabupaten ini, selain ada 369 dam, 254 pom air, air terjun, dan sejumlah danau yang lazim disebut ranu seperti Ranu Klakah, Ranu Lading dan Ranu Pakis. Sedangkan apabila dilihat secara topografinya, Kabupaten Lumajang ini berada pada kemiringan : 0-15% (65% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian semusim, 15-25% (6% luas wilayah) merupakan daerah yang lebih baik untuk pertanian tanaman perkebunan, 25-40% (11% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan prinsip konversasi, 40% keatas (18% luas wilayah) merupakan daerah yang mutlak harus dihutankan sebagai pelindung sumberdaya alam.

Kabupaten Lumajang juga memiliki gunung berapi aktif yaitu Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di pulau Jawa. Selain itu, gunung tersebut memiliki prospek yang menjanjikan bagi Kabupaten Lumajang, potensi itu antara lain berupa sumber tambang mineral yang dikeluarkan dari Gunung Semeru yang berbentuk batu, pasir (Golongan A, B maupun C) dan mineral logam. Gunung Semeru bahkan juga menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Lumajang untuk pendakian.



Gambar 2. Peta Kabupaten Lumajang

Sumber : <https://lumajangkab.go.id/profil/maplmj.ph> diakses pada tanggal 2 Desember 2019

b. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang merupakan kabupaten yang memiliki karakter wilayah yang relatif cukup beragam, meliputi wilayah pertanian, perkebunan, wilayah hutan, perairan, perikanan dan lain sebagainya. Beraneka ragamnya jenis karakter wilayah di Kabupaten Lumajang pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomi sebagai sumber pendapatan daerah. Disisi lain, dengan adanya potensi dan kondisi wilayah yang telah diuraikan di atas, kiranya perlu mendapatkan perhatian yang sungguh – sungguh untuk dapat ditumbuh kembangkan sehingga nantinya menghasilkan

suatu produk yang memiliki daya guna dan bernilai ekonomi bagi pembangunan Kabupaten Lumajang.

Wilayah Kabupaten Lumajang dengan mayoritas lahan yang didominasi dalam bentuk kawasan hutan yang meliputi Hutan Lindung, Taman Nasional, Hutan Produksi dan Hutan Rakyat yang memiliki luas 114.238,05 Ha atau sekitar 63.79% dari total luas Kabupaten Lumajang. sedangkan untuk pemanfaatan lainnya yaitu budidaya pertanian, budidaya perikanan, budidaya perkebunan, permukiman, perindustrian, rawa/waduk dan sebagainya. Pemanfaatan ruang terkecil yaitu dari pemanfaatan ruang untuk perikanan (tambak, kolam, emang) yaitu 127 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa ruang yang ada di Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh lahan yang belum dikelola dengan baik sehingga pengalokasian ketersediaan lahan skala di kabupaten ini masih sangat memungkinkan untuk dapat diaplikasikan dengan dikembangkannya beberapa budidaya antara lain :

1. Kawasan Perdagangan dan Jasa
2. Kawasan Pemukiman
3. Kawasan Pendidikan
4. Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran
5. Kawasan Industri
6. Kawasan Pariwisata
7. Kawasan Pelabuhan dan Dermaga

c. Potensi Pariwisata Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang sebagai mana halnya dengan kabupaten lainnya yang ada di wilayah Indonesia pada umumnya memiliki kondisi alam dengan keistimewaan panoramanya yang melahirkan berbagai objek wisata. Di Jawa Timur sendiri, telah memiliki objek wisata yang sudah dikenal tidak hanya tingkat regional bahkan tingkat nasional dan mendunia. Misalnya: Kabupaten Banyuwangi terkenal dengan objek wisata Pulau Merah, Kabupaten Situbondo dengan objek wisata Pasir Putih dan lain sebagainya. Sedangkan di Kabupaten Lumajang sendiri, ada beberapa kawasan yang potensial untuk dijadikan objek wisata Alam sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Objek Wisata Alam Kabupaten Lumajang

No	Objek	Jarak	Jenis dan Letak Objek Wisata
1	Ranu Bedali	26 Km	Wisata danau dengan panorama yang cukup indah dan terletak di kecamatan Ranuyoso.
2	Ranu Klakah	20 Km	Wisata danau dengan latar gunung lamongan serta banyak fasilitas permainan di dalamnya, terletak di Kecamatan Klakah.
3	Puncak B-29	50 Km	Kawasan Bukit dengan nuansa Desa dengan perkebunan berbagai macam sayuran yang menawarkan keindahan lautan pasir Gunung Bromo

No	Objek	Jarak	Jenis dan Letak Objek Wisata
			terletak di Kecamatan Senduro.
4	Ranu Pane	45 Km	Kawasan hutan yang masih alami dengan panorama alami serta hawa sejuk terletak di Kecamatan Senduro
5	Ranu Regulo	46 Km	Sumber mata air danau di dalam Taman nasional Bromo Tengger Semeru yang memiliki panorama sangat menawan terletak di Kecamatan Senduro
6	Puncak Mahameru	70 Km	Gunung tertinggi di Pulau Jawa dan populer di dunia pendakian terletak di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo
7	Pantai TPI	70 Km	Pantai yang memiliki panorama pantai dengan hutan cemara serta tempat jual beli ikan segar terletak di Kecamatan Tempursari.
8	Watu Godeg	65 Km	Objek wisata dan panorama pantai yang sangat indah dengan ciri khas batu karang yang sangat besar ditengah – tengah pantai terletak di Kecamatan Pasirian.
9	Kebun teh Kertowono	23 Km	Perkebunan teh disebelah barat lumajang yang memberikan pemandangan yang cukup indah dengan air terjun disekitar perkebunan terlatak di Gucialit.

No	Objek	Jarak	Jenis dan Letak Objek Wisata
10	Pemandian Alam Selokambang	6 Km	Pemandian alam yang dipercaya masyarakat dapat menyembuhkan penyakit rematik terletak di Desa Purworejo
11	Hutan Bambu	30 Km	Hutan yang di dalamnya banyak beraneka jenis bambu serta pengunjung akan disambut dengan monyet – monyet yang bebas berkeliaran terletak di Desa Candipuro.
12	Goa Tetes	55 Km	Objek wisata Goa yang terletak di Pronojiwo.
13	Air Terjun Tumpak Sewu	56 Km	Air terjun yang memiliki panorama indah yang dijuluki Niagara Indonesia terletak di Pronojiwo.
14	Pantai Bambang	20 Km	Pantai dengan pasir hitam yang sangat indah bila dikunjungi sore hari terletak di Pasirian.

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang (olahan penulis 2019)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten lumajang didominasi oleh wisata alamnya. Yang mana Kabupaten ini memiliki potensi wisata yang sangat alami. Hampir disetiap desa memiliki panorama alam yang dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung ke kabupaten ini. Sehingga memiliki daya tarik tersendiri disetiap desa yang ada di Kabupaten Lumajang.

d. **Gambaran Umum Kecamatan Senduro**

Senduro merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Lumajang yang berbentuk kecamatan dengan Luas Wilayah 228,67 km², dimana Kecamatan Senduro memiliki jarak Orbitasi 17 km dengan jarak tempuh 45 menit dari Kantor Camat Senduro ke pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Lumajang yang memiliki ketinggian 500 – 700 m di atas permukaan air laut (dpl) dengan curah hujan 4.176 mm pertahun. Kecamatan Senduro memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Gucialit
2. Sebelah Timur : Kecamatan Summersuko
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Pasrujambe
4. Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Berdasarkan tata administrasi kewilayahan, Kecamatan Senduro terdiri dari wilayah pedesaan dengan 12 desa antara lain :

Tabel 5. Pembagian Administratif Kewilayahan Kecamatan Senduro

No	Desa / Kelurahan	Luas Desa (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Purworejo	3,12	4.548
2.	Sarikemuning	5,95	3.201
3.	Pandansari	8,44	4.885
4.	Burno	40,72	4.700

No	Desa / Kelurahan	Luas Desa (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
5.	Kandangtepus	20,02	8.991
6.	Kandangan	18,88	4.178
7.	Bedayu	3,17	1.874
8.	Bedayu Talang	2,92	1.474
9.	Wonocempokokayu	27,39	2.583
10.	Argosari	56,05	3.350
11.	Ranupane	35,79	1.256
12.	Senduro	6,22	6.707

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (Kecamatan Senduro dalam angka 2019 olahan penulis 2019)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk di Kecamatan Senduro sebesar 47.747 dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,03% pertahun, dengan kepadatan penduduk 215 jiwa/km². Berdasarkan jenis tanahnya di Kecamatan Senduro dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu : tanah sawah, tanah kering, dan lainnya. Diantara ketiga jenis tersebut tanah lainnya memiliki area luas, yaitu 13.655 hektar atau 59,72 persen dari luas keseluruhan.

IV.1.2 Gambaran Umum Situs Penelitian

A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

a. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Lembaga ini pertama lahir dengan nama awal Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang pada tahun 2012, dimana pada saat itu sektor pariwisata belum menjadi sektor prioritas pembangunan daerah, namun sejak terlantiknya Bapak Sjahrazad Masdar sebagai Bupati Lumajang untuk kedua kalinya pada tahun 2014-2019 maka sektor pariwisata menjadi bidang prioritas pembangunan daerah dan sejak itulah Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang berganti nama menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dengan struktur organisasi yang terdiri 5 (lima) bidang yaitu: bidang Pemasaran, Destinasi Pariwisata, Kebudayaan, Ekonomi Kreatif dan Sekretariat.

Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, dan 12 (duabelas) seksi. Berikut ini merupakan tugas dari masing – masing bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

1. Sekretariat

2. Pemasaran

Bidang pemasaran ini memiliki tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan promosi dan kerja sama, data dan informasi, serta kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan. Pemasaran mebawahi 3 (tiga seksi) yaitu : 1) Seksi Promosi dan Kerja sama, 2) Seksi Data dan

Informasi, 3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Kepariwisataan.

3. Destinasi Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta usaha pariwisata. Destinasi Pariwisata membawahi 3 (tiga) seksi

yaitu : 1) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata, 2) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, 3) Seksi Jasa Usaha Pariwisata.

4. Kebudayaan

Bidang ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengkajian, pembinaan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan di bidang kebudayaan. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu : 1) seksi Seni Budaya, 2) Seksi Sejarah dan Purbakala, 3) Seksi Adat Budaya;kelompok Jabatan dan Fungsional

5. Ekonomi Kreatif

Bidang ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana Ekonomi kreatif serta Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu : Seksi Pengembangan Ekonomi

Kreatif, Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif, dan 3) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

memiliki visi dan misi lembaga yang disesuaikan dengan tujuan pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

a. VISI :

“Terwujudnya Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata berbasis kearifan lokal yang berpeluang investasi serta mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa potensi kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Lumajang perlu untuk ditumbuh kembangkan secara berkesinambungan dengan memperhatikan kearifan lokal sebagai khazana budaya bangsa.

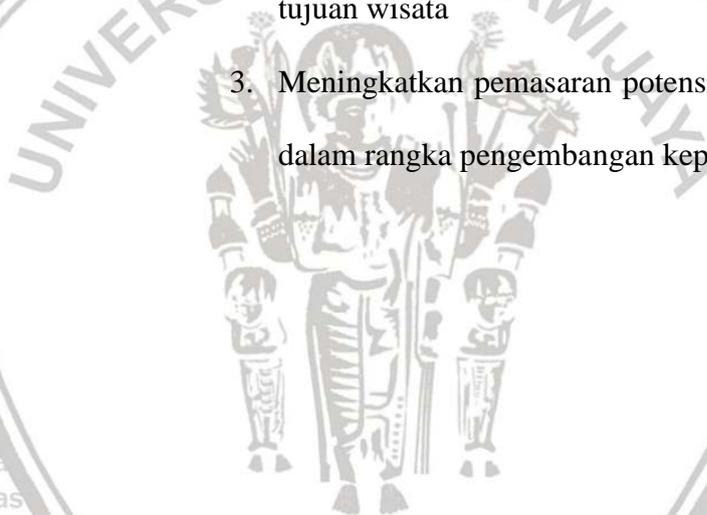
Dalam hal ini, upaya untuk pelestariannya dapat dilakukan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas potensi objek wisata yang mampu memberikan peluang terhadap pembangunan daerah sekaligus menggairahkan minat investasi bidang pariwisata, yang pada gilirannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

Seiring dengan besarnya potensi daerah yang dimiliki, serta

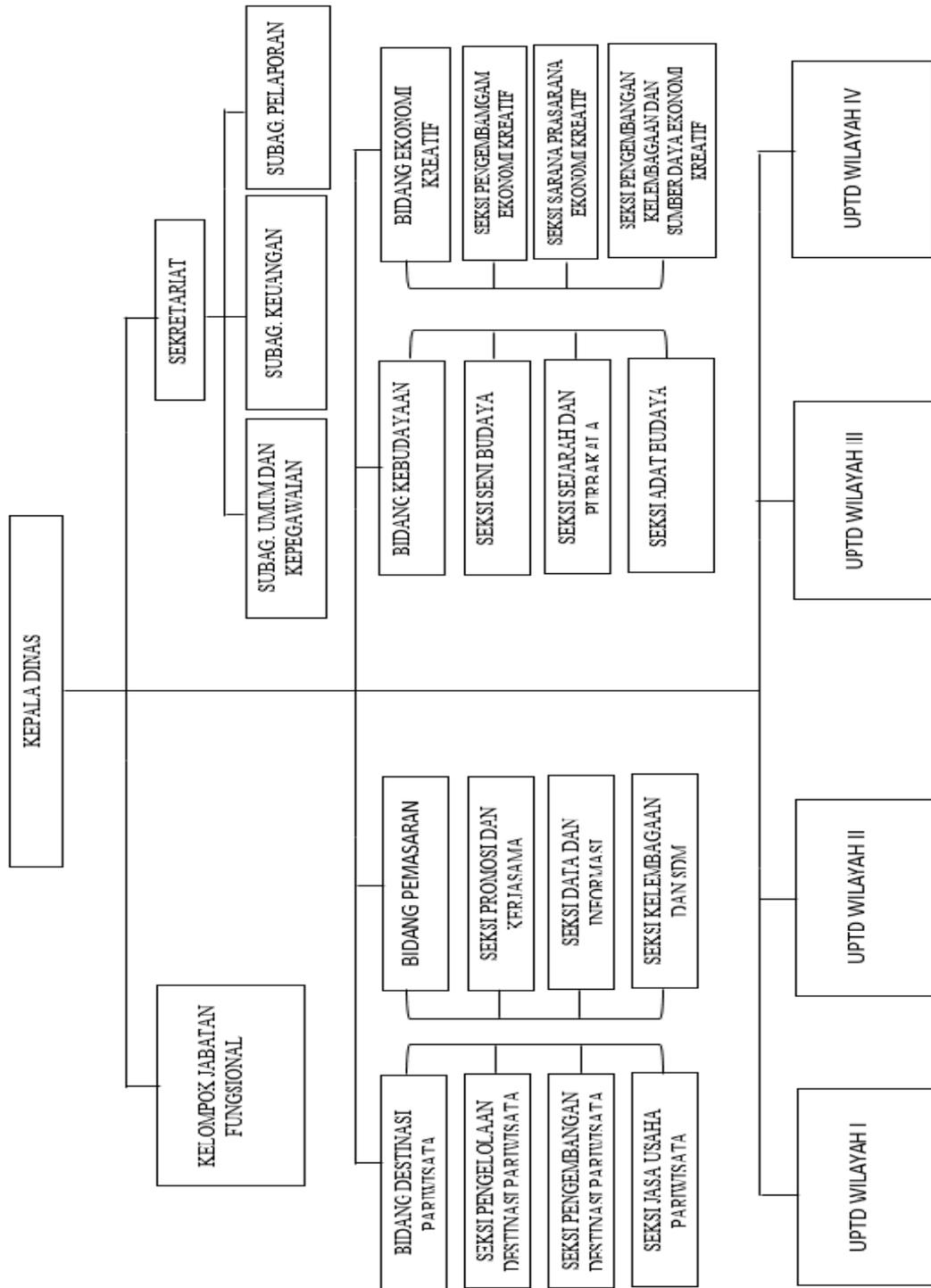
kemampuan daya saing yang tinggi di tingkat regional, nasional maupun internasional dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas pada saat ini.

b. MISI :

1. Mewujudkan peningkatan, pengembangan serta pelestarian budaya daerah
2. Meningkatkan dan mengembangkan potensi daya tarik wisata (DTW) di Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata
3. Meningkatkan pemasaran potensi budaya dan pariwisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan.



Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang (olahan penulis 2020)

B. Gambaran Umum Kawasan Wisata B-29

Objek wisata B-29 merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Desa Argosari di wilayah Kecamatan Senduro dengan ketinggian 1.900 mdpl sampai 2.900 mdpl di atas permukaan laut yang berbatasan dengan Gunung Bromo. Jarak Desa Argosari dengan Kecamatan Senduro adalah 17 Km dan Jarak Desa Argosari sendiri dengan Kabupaten Lumajang adalah 35 Km. Desa Argosari ini memiliki luas sebesar 56,05 Km² (Sumber: Desa Argosari, Kecamatan Senduro dalam angka 2019).

Secara demografi, Desa Argosari merupakan salah satu dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Pembagian Administrasi Desa

No	Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Purworejo	3.12	4.689
2	Sarikemuning	5,95	3.376
3	Pandansari	8.44	5.502
4	Senduro	6.22	7.735
5	Burno	40.72	4.543
6	Kandang Tepus	20.02	9.361
7	Kandangan	18.88	4.731
8	Belayu	3.18	2.240

No	Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk
9	Bedayu Talang	2.92	1.713
10	Wono Cepoko Ayu	27.39	2.786
11	Argosari	56.05	4.228
12	Ranupani	35.79	1.409
Kecamatan	2018	228.68	52.313
	2017	228.68	50.387

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang (Kec. Senduro dalam angka 2019) olahan penulis 2020

Secara administratif Desa Argosari dibagi menjadi 4 (empat dusun) yaitu Dusun Krajan Argosari, Dusun Gedog, Dusun Pusung Dhuwur dan Dusun Bakalan. Jumlah penduduk Desa Argosari berjumlah 4.228 (Sumber: Desa Argosari, Kecamatan Senduro dalam angka 2019).

Desa Argosari ini terletak di lereng Gunung Semeru yang memberikan tingkat kesuburan dan kesejukan pada kawasan tersebut sehingga menjadikan tanah di kawasan Desa Argosari sangat cocok untuk pertanian. Oleh karenanya hal tersebut memberikan dampak perekonomian. Sektor pertanian di desa tersebut meliputi jenis tanaman sayur seperti : kentang, bawang daun, wortel dan kubis. Mata pencaharian penduduk Desa Argosari sebagian besar sebagai petani, peternak, buruh tani, dan ada beberapa sebagai pengusaha atau pengepul hasil pertanian masyarakat Desa Argosari.

Kehidupan masyarakat Desa Argosari ini juga masih dikenal sangat kental memegang adat tradisi dan budaya leluhurnya yakni suku Tengger yang sudah berlangsung dan diwarisi secara turun menurun.

Kehidupan masyarakat suku Tengger ini menjadikan Desa Argosari memiliki kearifan lokal tersendiri atau ciri khas dan daya tarik yang unik. Hal ini disebabkan oleh suhu dingin udara di Desa Argosari yang mencapai 5°C. Demikian pula dengan kondisi geografisnya yang berada di dataran tinggi mampu memberikan panorama alam yang sangat indah dan alami sangat mengagumkan. Sedangkan tingkat perekonomian masyarakat Desa Argosari dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu ekonomi rendah, ekonomi menengah dan ekonomi tinggi. Dibandingkan dengan desa – desa lainnya yang ada, Desa Argosari merupakan salah satu desa yang memiliki kelebihan berupa objek wisata panorama alam yang sangat terkenal bahkan menjadi ikon wisata alam andalan Kabupaten Lumajang yaitu Wisata Puncak B-29.



Gambar 4. Pintu masuk B-29 Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Sumber : Observasi penulis 2020



Gambar 5. Puncak B-29 Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Sumber : Observasi penulis 2020

Gambar di atas menunjukkan pintu masuk sebelum menuju ke Puncak B-29, disana terdapat loket tiket masuk, tempat parkir kendaraan dan pangkalan ojek jika menggunakan jasa mereka dan gambar selanjutnya menunjukkan lokasi puncak B-29. Puncak B-29 sebagai sebutan objek wisata dikarenakan lokasinya berada pada puncak atau bukit yang memiliki ketinggian 2.900 mdpl yang selanjutnya dikenal oleh masyarakat menjadi wisata puncak B-29. Objek wisata tersebut, merupakan puncak tertinggi di kawasan Gunung Bromo yang terletak disisi tenggara Gunung Bromo. Untuk menuju objek wisata ini, memerlukan jarak tempuh 50 km dari Kabupaten Lumajang.

Wisata Puncak B-29 ini, selain dikelilingi hamparan kebun pertanian memiliki alam yang mempesona, pemandangan yang indah dan udara dingin di puncaknya. Wisatawan atau pengunjung bisa menikmati kesejukan panorama Pegunungan Tenger yang sangat

alami. Di puncak B-29 ini juga dikenal sebagai “Negeri di atas awan”.

Diperjalannya sendiri untuk mencapai puncak, akan melewati hamparan perkebunan sayuran yang sangat indah seperti perkebunan sayuran kentang, kubis, wortel, bawang putih dan bawang daun.

Wisatawan yang berkunjung ke Puncak B-29 ini tergolong banyak dan diminati baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hal ini dapat dilihat dari laporan kunjungan wisata

Puncak B-29 pada tahun 2019 :

Tabel 7. Laporan Kunjungan Wisata Puncak B-29 (2019)

No	Bulan	Wisnus	Wisman	Keterangan
1	Januari	631	22	
2	Februari	539	19	
3	Maret	491	7	
4	April	756	0	
5	Mei	-	-	Bulan Puasa
6	Juni	4.261	54	
7	Juli	926	0	
8	Agustus	715	4	
9	September	830	13	
10	Oktober	858	17	
11	November	1.507	8	
12	Desember	1.924	5	
	JUMLAH	11.514	149	

Sumber : Pengelolah Wisata B-29 (olahan Penulis 2020)

Dilihat dari data di atas bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Puncak B-29 pada tahun 2019 berjumlah 11.514 orang yang didominasi oleh wisatawan nusantara dan 149 orang didominasi oleh wisatawan mancanegara dan pada bulan Mei wisatawan baik nusantara maupun mancanegara tidak ada yang mengunjungi objek wisata, dikarenakan bertepatan dengan bulan puasa menurut pengelola wisata B-29. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, wisatawan yang berkunjung ke Puncak B-29 ini bersifat musiman. Dan menurut warga Desa Argosari, memang kalau bulan ramadhan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara tidak berkunjung ke Puncak B-29 dikarenakan, jarak tempuh yang cukup memakan waktu lama dan membutuhkan tenaga yang lebih.

IV.2 Penyajian Data Fokus Penelitian

IV.2.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29

A. Partisipasi tahap persiapan

Pembangunan pariwisata dan budaya yang dikelola oleh pemerintah diperlukan adanya partisipasi masyarakat dan *stake holder* untuk mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata B-29 ini, yang dibantu oleh dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dimana pemerintah disini sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti pelatihan dan

sosialisasi tentang program pengembangan pariwisata khususnya untuk masyarakat di Desa Argosari agar kesadaran mereka dalam peran sertanya mengembangkan objek wisata Puncak B-29 terus meningkat sehingga mampu bersaing dengan objek – objek wisata lainnya. Sebelum dilakukan pelatihan dan sosialisasi, pemerintah melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat dengan melalui Kelompok Sadar Wisata Desa Argosari B-29.

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari putusan – putusan yaitu melalui tahapan – tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap – tahap tertentu keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan mengingat ide – ide atau pemikiran dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan. Partisipasi dapat diwujudkan pada berbagai macam kesempatan, seperti melalui pertemuan atau rapat, melalui surat atau saran dan tanggapan terhadap proses pembangunan. Partisipasi masyarakat di Desa Agosari kawasan wisata B-29 dalam hal persiapan yang akan dibahas disini bukanlah masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi melalui wakil – wakilnya sebagai representatif masyarakat.

Pada tahap persiapan di dalam mengembangkan pariwisata di kawasan wisata B-29 tidak terlepas dari peran maupun pendapat masyarakat di dalamnya. Tahap persiapan ini dilakukan melalui sosialisasi mengenai bagaimana pengembangan objek wisata. Sosialisasi ini yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Anggota sosialisasi disini yaitu seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Pengelola Paguyuban Ojek dan perwakilan masyarakat. Sesuai pernyataan tersebut, Bapak Fandi Ahmad selaku staf dari Seksi Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang mengatakan :

“jadi, dalam memajukan atau mengembangkan partisipasi masyarakat, Dinas Pariwisata melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat desa Argosari yang mana nantinya kita menunjuk beberapa perwakilan untuk berdiskusi dengan kami. Seperti diberikan pemahaman lah gimana mengembangkan wisata agar lebih baik kedepannya. Kan kita tidak tau keadaan sosial maupun kemauan masyarakatnya gimana jadi kita kumpulkan dari beberapa perwakilan itu, yang nantinya dari perwakilan ini menjelaskan kepada masyarakat yang ada disana.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fandi Ahmad tanggal 2 Januari 2020)

Menurut pernyataan di atas, Bapak Budiyanto selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata mengatakan bahwa :

“partisipasi masyarakat dalam mengembangkan objek wisata di sini, kita ditunjuk beberapa perwakilan oleh dinas yang mana kita diberikan beberapa program atau cara bagaimana mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. *Kene iki, dadi sekretaris pokdarwis sak kabupaten, sing dadi ketua ne Tumpak Sewu. Kelompok iki jeneng e ASPOL*

(Asosiasi Pokdarwis Lumajang), lah wayah e pemaparan – pemaparan kene iki saling sharing ide – ide dan gagasan – gagasa sing apik-apik. Dadi kene iso mengimplementasikan gagasan mau di deso e kee mbak, kan wong kene iki senenge ndak teori tapi langsung (praktik e).” (hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto tanggal 9 Februari 2020)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Argosari kawasan wisata B-29 sangat *open mindet* dengan program pemerintah dan mencoba menciptakan solusi – solusi dari permasalahan yang ada serta masyarakat disana sangat tinggi partisipasinya untuk mengembangkan pariwisata yang ada. Dari solusi – solusi yang ada memunculkan beberapa ide dari masyarakat yang mana pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang juga menyambut dengan baik atas aspirasi dari masyarakat.



Gambar 6. Bimbingan Teknis bersama Komisi X DPR RI (Forum Pokdarwis JATIM)

Sumber : Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Agosari (2017)

Gambar di atas merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan, dimana perwakilan dari masyarakat yaitu ketua Kelompok Sadar Wisata dan beberapa rekan mengikuti pelatihan terkait pengembangan pariwisata. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Komisi X DPR RI bersama forum kelompok pokdarwis se-Jawa Timur. Gambar tersebut diambil oleh ketua kelompok sadar wisata Argosari B-29 pada saat mengikuti kegiatan.

B. Partisipasi tahap perencanaan

Tahap perencanaan dalam mengembangkan wisata, yaitu partisipasi masyarakat disini bersifat fungsional artinya masyarakat setempat diharapkan mampu berpartisipasi dalam mengembangkan wisata yang sudah dilakukan oleh tenaga ahli dari luar desa setempat. Perencanaan pembangunan merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (Dapat diterapkan). Perencanaan pembangunan merupakan suatu konsep untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dengan memanfaatkan beberapa sumber daya yang ada, dan memiliki

orientasi yang bersifat menyeluruh. Dalam suatu tahap perencanaan biasanya berfokus atau lebih intern kepada penyusunan program kegiatan. Karena, di dalam al itu akan terlihat beberapa hal – hal yang dikerjakan.

Keikutsertaan masyarakat dalam program kegiatan sudah termasuk kedalam partisipasi masyarakat yang bersifat fungsional. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat disini merupakan suatu ukuran dalam melihat tingkat partisipasi masyarakat. Tahap perencanaan dalam mengembangkan Objek Wisata B-29 di Desa Argosari ini dilakukan dengan mempercayakan para ahli untuk melakukan atau melaksanakan pengembangan pariwisata. Sesuai dengan pernyataan tersebut, menurut Bapak Fandi Ahmad selaku staf Dari Seksi Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang mengatakan :

“dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat ditahap perencanaan program kegiatan yaitu dengan mendatangkan beberapa ahli dari beberapa bidang di Dinas Pariwisata, tidak hanya dilakukan oleh satu bidang saja akan tetapi dilakukan oleh beberapa bidang yang mana nantinya pelatihan dilakukan dari setiap bidang berbeda – beda bisa melalui program kuliner, tata kelola *homestay*, dengan cara mendatangkan para ahli yang sudah melakukan penerapan di objek wisata lainnya. Dimana pola – pola itu sudah diterapkan atau diajarkan. Kita sendiri berharap menjadi suatu penambahan nilai untuk sumber daya manusia itu sendiri.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fandi Ahmad tanggal 6 Januari 2020)

Menurut pernyataan di atas, menurut Bapak Supriyanto selaku pengelola wisata B-29 menyatakan bahwa:

“perencanaan yang dilakukan yaitu melalui program – program pelatihan seperti cara menerima tamu, mengelola *homestay* dan lainnya. (Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto tanggal 13 Januari 2020)



Gambar 7. Persamuan bersama para pemuka Adat, Tokoh, Sesepuh dan Tokoh Pemuda di Desa Argosari
Sumber : Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Agosari (2017)

Gambar di atas menunjukkan masyarakat khususnya kepala adat dan tokoh masyarakat yang melakukan persamuan atau pertemuan. Dalam pertemuan tersebut perwakilan masyarakat membahas tentang bagaimana mengembangkan wisata B-29 kedepannya. Menurut Bapak Budi selaku ketua kelompok sadar wisata menjelaskan bahwa masyarakat sebelum melakukan pengembangan wisata merencanakan program – program apa saja yang antinya dapat diterima masyarakat dan tidak menghilangkan ciri khas adat desa Argosari.

C. Partisipasi Tahap Operasional

Komponen yang terpenting dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata yaitu tahap operasional dimana disini masyarakat ikut berperan dalam bentuk partisipasi fisik maupun bentuk partisipasi non fisik. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Ketua Pokdarwis Wisata Puncak B-29 yaitu Bapak Budiyanto, beliau menyatakan bahwa :

“partisipasi masyarakat ndik kene tergolong apik. Masyarakat kene iki mesti gawe pesamuan (perkumpulan) antara warga adat. Setiap tahun iki onok kegiatan, dan setiap bulan pisan onok kegiatan. Contoh e setiap RT membuat ciri khas dewe – dewe dari tanaman khas tengger (misal: bunga edelwis). Terus onok kegiatan perkemahan dan akeh maneh. Mereka ngikuti opo sing tau disosialisasikan sama saya dan arek – arek.” (hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto tanggal 9 Februari 2020)

Hal serupa juga dikuatkan lagi oleh Bapak Dian selaku pengelola paguyuban ojek wisata Puncak B-29, bahwa :

“partisipasi disini memang bagus mbak sebenarnya. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam mengelola Homestay, rumah makan, misalnya dari kami sendiri ya, teman – teman ini menerima tamu dengan baik lah apa yang telah disosialisasikan mereka lakukan (praktikkan).” (Hasil wawancara dengan Bapak Dian pada 13 Januari 2020)

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu keberhasilan dari perencanaan ialah tahap operasional, dimana dalam tahap ini partisipasi masyarakat diharapkan mampu ikut serta atau berperan aktif dalam program – program

pembangunan yang telah ditetapkan, agar dalam pengembangan objek wisata dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.



Gambar 8. Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner

Sumber: *Pengelola Wisata B-29 (2019)*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Argosari sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan. Gambar di atas merupakan salah satu contoh dimana masyarakat diajarkan bagaimana cara mengelolah hasil bumi yang ada di Desa Argosari sehingga mampu menjadi suatu ciri khas di bidang kuliner. Hasil bumi, di desa ini biasanya seperti kentang, wortel, bawang – bawang. Selain itu, pelatihan yang diajarkan kepada masyarakat Desa Argosari kawasan B-29 seperti diadakannya pelatihan bagaimana cara mengelolah *homestay*, bagaimana menerima tamu yang datang baik dari nusantara maupun mancanegara.

D. Partisipasi tahap pengembangan

Masyarakat merupakan objek dari segala kegiatan pengembangan pariwisata di Desa Argosari Puncak B-29.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Bukhori selaku masyarakat sekitar wisata puncak B-29 menyatakan bahwa :

“partisipasi mereka (masyarakat) cukup tinggi, satu untuk menertibkan pariwisata disini, yang dulu ojek – ojek an disini belum rapi (ojek liar) tapi sekarang yang jumlahnya 120 tukang ojek sudah bisa ditertibkan. Maulah mengikuti aturan yang ada, menyambut tamu dengan sopan dan sekarang memang SDM yang rendah sekarang sudah mengalami peningkatan dan mengertilah bagaimana mereka menghadapi para tamu yang datang.” (Hasil wawancara dengan Bapak Bukhori pada 13 Januari 2020)

Bapak Dian selaku pengelola Paguyuban ojek juga menyatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat disini ya dapat dikatakan baik mbak, karena masyarakat disini mengelola *homestay* dengan menggunakan rumah mereka sendiri, kemudian untuk toilet umum juga menggunakan yang dibuat oleh orang – orang sini. Penyediaan parkir dipintu masuk ini ya karena inisiatif dari masyarakat sini. Meskipun, dispartubud mengelola *rest area* tapi kan letaknya jauh dari pintu masuk, masih ditempuh beberapa km lagi. Jadi inisiatif kita buat menyediakan lahan parkir, pos – pos karcis dan pos penyediaan ojek.” (Hasil wawancara dengan Bapak Dian pada 10 Februari 2020)

Hasil dari wawancara di atas, membuktikan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi, dimana kesadaran mereka untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata puncak B-29 merupakan peran serta yang harus ditumbuh kembangkan.

E. Partisipasi tahap pengawasan

Partisipasi masyarakat tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan.

Hal ini diutarakan oleh Bapak Budiyanto selaku Ketua Pokdarwis Puncak B-29 bahwa :

“partisipasi masyarakat disini masih perlu adanya pengawasan. Karena kan, kalau partisipasi disini hanya dijalankan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak dilakukan pengawasan takutnya keluar dari jalur atau program – program yang sudah dibuat. Semisal yang dulu, penarikan tarif ojek tinggi tapi kita lakukan pengawasan dan dapat laporan – laporan dari wisatawan akhirnya kita evaluasi agar tidak terjadi hal serupa. Kemudian untuk kegiatan atau program – program dari *persamuan* tadi apabila tidak diawasi akan berhenti tengah jalan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto pada 21 Januari 2020)

Bapak Dian selaku pengelola paguyuban ojek juga menyatakan bahwa :

“meskipun partisipasi disini baik, ya tetap saja diperlukan pengawasan misalnya saya selaku pengelola paguyuban juga menertibkan teman – teman ojek apabila mereka tidak sesuai dengan prosedur yang diberikan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Dian pada 10 Januari 2020)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Supriyanto selaku pengelola wisata B-29 :

“disini, saya perwakilan dari disparbud juga melihat bahwa masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Tapi dengan didampingi dan pengawasan sangat diperlukan agar terus berjalan partisipasi masyarakat yang akhirnya kita melaporkan kepada dinas bagaimana partisipasi masyarakat disini, kemudian pengunjung yang datang kesini juga dilakkan monitoring.” (Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto pada 10 Februari 2020)

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Argosari kawasan Wisata Puncak B-29 akan berjalan dengan baik apabila terus dilakukan pengawasan. Hal ini dilakukan agar dapat dilakukan perbaikan – perbaikan apabila tidak sesuai aturan yang ditetapkan.



Gambar 9. Sosialisasi dengan Bapak Polisi terkait Pengawasan dan pengamanan kawasan wisata B-29

Sumber: Pengelola Wisata B29 (2018)

Gambar di atas merupakan kegiatan dari masyarakat desa wisata Argosari B-29 bersama dengan Bapak Polisi. Salah satu kegiatan masyarakat dengan Bapak Polisi yaitu adanya sosialisasi terkait pengawasan dan pengamanan desa kawasan wisata B-29. Hal itu, dilakukan untuk menghindari masalah – masalah yang dapat merugikan wisatawan maupun masyarakat sekitar. Salah

satu masalah yang dikeluhkan oleh wisatawan yaitu tidak kesesuaian tarif ojek.

IV.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat terkait Partisipasi

Masyarakat

a. Faktor pendukung

1) Kemauan Masyarakat

Kemauan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendukung akan timbulnya partisipasi masyarakat.

Kemauan sendiri merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri (masyarakat) yang dikendalikan oleh pikiran. Kemauan yang timbul di masyarakat Desa Argosari dalam pengembangan objek pariwisata yaitu dapat dilihat dari rasa antusiasisme mereka, terutama dalam mengembangkan objek pariwisata yang ada.

Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Bapak Budiayanto selaku Ketua Pokdarwis Desa Argosari Puncak

B-29 :

“masyarakat disini itu, memiliki tingkat kemauan yang tinggi, artinya mereka sangat berperan aktif seperti anak – anak muda disini saya ajak untuk melakukan pelatihan maupun sosialisasi untuk mengembangkan wisata disini sangat antusias. Didukung lagi dengan masyarakat yang ada disini apabila ada program apa mereka langsung mempraktikannya tidak suka dengan ada teori – teori gitu.” (Hasil wawancara dengan Bapak Budiayanto 09 Februari 2020)

Bapak Dian selaku pengelola paguyuban ojek di pariwisata B-29 juga mengatakan bahwa :

“partisipasi masyarakat disini bagus mbak, misal saja dari paguyuban ojek disini ya. Kita sering melakukan pertemuan – pertemuan dengan paguyuban ojek wisata yang lain atas kemauan kita sendiri. Jadi kita saling bertukar informasi lah bagaimana cara melayani wisatawan yang datang kan disetiap tempat wisata berbeda – beda nanti infonya saya dan teman – teman menerapkannya disini mbak. Jadi kita saling bertukar gitu mbk (*sharing*). Kadang kita melakukan sosialisasi di Desa Gucialit, Tumpak Sewu, TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) dan lainnya mbak. Ya kita semua paguyuban ojek sangat mendukung dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, agar lebih baik lagi kedepannya. (hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto tanggal 13 Januari 2020)

Sependapat dengan pernyataan di atas, Bapak Supriyanto selaku pengelola objek wisata B-29 mengatakan bahwa :

“ya kalau ditanya partisipasi masyarakat disini tergolong tinggi mbak, mereka antusias dengan adanya objek wisata disini. Seperti rumah – rumah mereka digunakan sebagai *homestay* bagi pengunjung wisatawan yang datang atau juga mereka (masyarakat) disini membuka warung rumah makan buat pengunjung gitu mbak..” (Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto pada 13 Januari 2020)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemauan masyarakat sekitar objek

wisata B-29 atau masyarakat Desa Argosari tepatnya dalam berpartisipasi dapat dikatakan sudah cukup besar dan baik dalam bentuk partisipasi materiil maupun non materiil. Kemauan partisipasi masyarakat disini dapat dibuktikan dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang sudah diselenggarakan.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya dana

Salah satu faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat untuk mengembangkan objek wisata B-29 yaitu keterbatasan dana. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ketua Pokdarwis Desa Argosari Puncak B-29 bahwa :

“saya dan anggota kalau mau melakukan pelatihan dengan kabupaten lainnya itu ya pakai uang iuran sendiri. Masyarakat disini untungnya guyub, jadi kalau ada kebutuhan apa *aku selaku perwakilan masyarakat dikene ndak terlalu nyagerno dana teko pemerintah. Karena opo, soal e kene gak ngerti mbak onok dana opo ndak teko pemerintah. Dadi dalam partisipasi masyarakat gawe ngembangno pariwisata yo kurang e dana.* (hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto tanggal 9 Februari 2020)

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari pengelola wisata B-29 bahwa :

“sebenarnya, dana dari pemeritah sendiri ini tergolong sedikit buat pengembangan pariwisata yang ada disini. Dikarenakan pemerintah hanya mengelola rest area 1 dan rest area 2 saja, dan sisanya dibiarkan masyarakat yang

mengelola sisanya.” (hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto tanggal 21 Januari 2020)

Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata di Desa Argosari Puncak B-29 mengalami kendala atau penghambat yaitu kurangnya dana. Oleh karenanya, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wisata Puncak B-29, masyarakat bekerja sama dalam mengelola wisata meskipun dana yang dibutuhkan kurang.

2) Rendahnya Pengetahuan atau pendidikan masyarakat

Pengetahuan maupun pendidikan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan objek wisata B-29 masih tergolong kurang, hal ini dikemukakan oleh Bapak Budiyanto selaku ketua Pokdarwis bahwa :

“awalnya saya dalam mengajak masyarakat sini ini susah, dikarenakan masyarakat sini masih bersifat kesukuan dan rata – rata dulu kan lulusan paling – paling yang tinggi SMP. Apabila diberi pemahaman tentang bagaimana peran masyarakat dalam mengembangkan wisata disini mereka masih belum paham hal itu dikarenakan informasi mengenai pariwisata kurang. Kemudian, dalam menerima tamu dari mancanegara atau tamu internasional juga masyarakat disini masih tergolong masih susah, maksudnya *bedo bahasa ngunu, dadi ngalami kesulitan dalam menerima tamu asing gawe komunikasi e*” (hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto tanggal 09 Februari 2020)

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Pak Bukhori bahwa :

“sebenarnya disini kalau ada tamu datang sudah memenuhi sapa pesona pariwisata. Tapi yang kurang disini itu, kalau ada tamu asing masih kesulitan memahami bahasanya. Kalau masalah perilaku orang sini sangat senang banyak tamu dari luar, kan berarti Desa Argosari ini dikenal sampai luar negeri.”

3) Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Kemudian, selain hal di atas faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan objek wisata di Desa Argosari yaitu dikarenakan kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Supriyanto selaku pengelola Objek Wisata B-29 bahwa :

“partisipasi masyarakat disini bagus, namun hanya ada *event* – *event* besar tertentu. Karena mereka kalau hari biasa itu, punya kepentingan sendiri atau pekerjaan yang mana menurut mereka itu lebih kelihatan lah hasilnya. Kan masyarakat disini, itu mata pencahariannya berkebun. Kemudian untuk hari biasa dan bukan hari libur, mereka jam kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 2 sore.” (hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto, tanggal 10 Februari 2020)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Budiyanto selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata, menunjukkan bahwa faktor keterbatasan komunikasi, pengetahuan, pendidikan masyarakat dan kurang sesuainya kebutuhan masyarakat merupakan kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Argosari ini, sehingga

akan berpengaruh terhadap pengembangan objek wisata Puncak B-29.

IV.3 Analisis Data

IV.3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di

Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Partisipasi pada dasarnya merupakan suatu konsep yang menjelaskan adanya keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan.

Hal ini terlihat dari terbentuknya paguyuban ojek wisata puncak B-29

Desa Argosari. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Sumarto

(2003) bahwa partisipasi merupakan proses ketika masyarakat atau

warga sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan

organisasi, dalam mengambil peran atau ikut serta dalam

memengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan

kebijakan yang langsung memengaruhi kehidupan mereka. Di dalam

usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk

menyejahterakan kehidupan mereka dibutuhkan keikutsertaan

masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam proses partisipasi

masyarakat tentunya ada bimbingan yang bersifat berkelanjutan dari

pemerintah yang bersangkutan sehingga partisipasi masyarakat dapat

berjalan sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Pengembangan

pariwisata di Indonesia sendiri sudah dilakukan sejak awal tahun

1978, sesuai dengan adanya TAP MPR No. IV/MPR/1978, yang

memuat bahwa pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk

meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, khususnya yang dikemukakan oleh Sumarto bahwa partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program pemerintah yang dijalankan untuk mengembangkan wisata Puncak B-29 di Desa Argosari. Pembangunan sendiri dapat berjalan dengan baik karena masyarakat sendiri yang mengelola pembangunan yang sifatnya prioritas bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Adanya kerja sama yang dilakukan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu menciptakan daya tarik maupun atraksi wisata bagi pengunjung yang datang. Selain itu, diterapkannya konsep CBT (*Community Based Tourism*) yang telah dikemukakan oleh Timothy (1999). Konsep CBT perlu diterapkan, karena akan membantu masyarakat untuk mendapatkan manfaat atas kemajuan pariwisata di wilayahnya khususnya Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang kawasan wisata B-29. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suanri (2003) yang menyebutkan bahwa CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan serta lebih melibatkan masyarakat lokal dalam melakukan pembangunan wilayah.

Berikut ini akan dipaparkan pembahasan analisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dengan menggunakan teori tahapan partisipasi menurut Prasiasa. Prasiasa sendiri mengklasifikasikan ada beberapa tahapan dalam partisipasi masyarakat, yaitu :

a. Partisipasi pada tahap persiapan

Prasiasa (2011) mengemukakan “tahap persiapan merupakan tahapan yang mana masyarakat mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk memahami bagaimana pengembangan pariwisata.”

Dapat dipahami dari pendapat Prasiasa bahwa dari tahap persiapan sangat membantu masyarakat untuk memahami betapa pentingnya partisipasi mereka dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Desa Argosari. Aspek ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi

— sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan nantinya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat berpartisipasi lebih dalam pengembangan pariwisata.

Jika dilihat dari teori tahap persiapan di atas, adapun fakta yang menyebutkan bahwa bentuk penyadaran masyarakat melalui sosialisasi dalam mengembangkan pariwisata di Puncak B-29

yang terletak di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sudah terlihat antusias namun menurut Ketua Pokdarwis Puncak B-29 masyarakat di Desa Argosari lebih tertarik pada praktik yang langsung. Masyarakat sekitar, tidak terlalu tertarik apabila hanya pemahaman melalui teori saja, masyarakat lebih tertarik jika langsung menerpakan secara langsung (praktiknya).

b. Partisipasi pada tahap perencanaan

Prasiasa (2011) menjelaskan bahwa “tahap perencanaan merupakan tahapan yang terdiri dari dua klasifikasi yaitu kebutuhan dan analisis kemampuan. Dalam tahap ini, partisipasi bersifat fungsional artinya masyarakat setempat diharapkan mampu berpartisipasi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh para ahli yang berasal dari luar desa setempat yang sudah diberikan kepercayaan dalam melakukan atau melaksanakan pengembangan.”

Dari pernyataan di atas, masyarakat di Desa Argosari kawasan wisata B-29 tergolong semu. Manfaat yang ditujukan tidak menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan umpan balik yang disampaikan oleh masyarakat lokal atas keputusan yang diambil oleh penguasa sering kali diabaikan. Padahal substansi dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata B-29 harusnya bersifat aktif dan menyeluruh kepada masyarakat. Hal

itu juga sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa :partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.” Namun, pada kenyataannya yang ada di lapangan, masyarakat yang mau digiring opininya untuk berpartisipasi hanya ada di beberapa desa atau malah hanya ada di satu desa saja. Hal itu dikemukakan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa partisipasi masyarakat yang sangat antusias untuk menerima pemahaman terkait tentang bagaimana mengembangkan pariwisata di Puncak B-29 ini hanya berada di Desa Gedok saja, sedangkan di desa lainnya yang masih termasuk di kawasan wisata Puncak B-29 masih tergolong rendah.

c. Partisipasi pada tahap operasional

Menurut Prasiasa (2011) menyatakan bahwa tahap partisipasi ini, terdiri atas partisipasi fisik dan partisipasi non fisik. Partisipasi fisik ini terkait tentang bagaimana masyarakat berkontribusi dalam melakukan suatu pengembangan semisal dalam membangun pos – pos yang digunakan sebagai tempat objek. Sedangkan partisipasi non fisik adalah dimana masyarakat ikut melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dari pernyataan di atas, menurut hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga Desa Argosari bahwa masyarakat disana

sudah melaksanakan kegiatan operasional yang baik. Artinya masyarakat di Desa Argosari sudah berkontribusi dengan cukup baik tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Hal itu juga sesuai dengan pernyataan Suwantoro (1997) bahwasannya peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata ada dua yaitu dapat berperan aktif dan berperan pasif.

d. Partisipasi pada tahap pengembangan

Menurut Prasiasa (2011) partisipasi pada tahap pengembangan disini bersifat spontan artinya masyarakat dengan kemauannya sendiri mendirikan atau mengelola usaha – usaha semisal yang berkaitan dengan oleh – oleh khas daerah tersebut. Pendapat di atas dapat dipahami bahwa pengembangan dalam partisipasi sangat menunjukkan nilai positif. Dimana, masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata. Menurut hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat Desa Argosari kawasan wisata B-29 sudah menunjukkan akan hal tersebut, dimana mereka sudah mulai mengelola usaha – usaha mereka seperti menyediakan warung makan, mengelola *homestay*. Namun, yang kurang disini yaitu tidak tersedianya pusat oleh – oleh khas dari tempat wisata B-29. Yang awalnya mereka membuat rangkaian bunga edelwis, tapi pada saat peneliti melakukan observasi disana tidak menemukan kegiatan tersebut. Dan

setelah melakukan konfirmasi kepada masyarakat kegiatan hanya dilakukan pada saat *event – event* tertentu tidak pada saat hari biasa. Padahal menurut Burns dan Holden (2000) produk pariwisata sangatlah penting dikarenakan produk wisata itu nantinya akan memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung, produk wisata sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat dijual (dalam Bafadhal, 2018).

e. Partisipasi pada tahap pengawasan

Prasiasa (2011) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat lebih ke arah pengawasan yang bersifat praktis dan preventif untuk menjaga atau mencegah desa tempat wisata agar tidak tercemar oleh tindakan – tindakan negatif. Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat lokal memiliki peran kontrol yang sangat substansial dalam mengembangkan objek wisata. Oleh karena itu, kewenangan pengambilan keputusan harus diberikan kepada masyarakat lokal. Dikarenakan masyarakat lokal lah yang memahami dan mengerti keadaan disana. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan wisata B-29 terlihat minim. Hal ini dikarenakan perencanaan pengembangan dilakukan oleh pemerintah yang selama ini masih menggunakan sistem *top down*, sehingga masyarakat tidak memiliki kompetensi praktis untuk melakukan

pengawasan. Sedangkan menurut hasil observasi saya, partisipasi masyarakat dalam hal ini hanya bersifat preventif dimana masyarakat Desa Argosari Kawasan Wisata B-29 hanya mencegah tindakan negatif yang mengganggu keamanan desa. Misalnya mengawasi anak muda yang melakukan hal – hal negatif disekitar puncak B-29, pengawasan terhadap ojek – ojek liar, kemudian penertiban tarif yang sudah ditetapkan yaitu biaya masuk Rp 5.000 dan ongkos ojek Rp 75.000 (pulang-pergi).

Tahap – tahap partisipasi di atas merupakan beberapa tahap dalam melihat partisipasi masyarakat Desa Argosari. Dari beberapa tahap di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap tahap tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan. Hal ini dikarenakan, fakta di lapangan yang kurang mendukung serta masyarakatnya yang belum semuanya memahami kalau pengembangan wisata dapat memberikan dampak yang baik kedepannya.

IV.3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi

Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangan objek wisata. Dari hasil penelitian terkait dengan faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam

pengembangan pariwisata ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, antara lain :

a. Faktor Pendukung

(1) Kemauan Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu aktor yang sangat berperan dalam pengembangan pariwisata di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. kemauan merupakan dorongan hati yang timbul dari dalam diri sendiri seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang dikendalikan oleh akal pikiran. Timbulnya kemauan dari diri individu biasanya selain muncul dari diri sendiri biasanya muncul dikarenakan adanya dorongan dari faktor luar, misalkan karena adanya ajakan dari orang lain melalui sosialisasi. Kemauan masyarakat yang timbul biasanya dapat diukur dengan sejauh mana keaktifan mereka untuk turut serta dalam pengembangan pariwisata. Hal ini sesuai dengan Dorojatin (dalam Slamet 2003;13) ada tiga faktor pendorong partisipasi masyarakat salah satunya yaitu kemauan masyarakat.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Desa Argosari kawasan wisata Puncak B-29, kemauan masyarakat timbul dari tingginya partisipasi mereka dalam mengembangkan objek wisata B-29. Dimana dilihat dari kutipan Bapak Budiyanto selaku Ketua Pokdarwis Desa Argosari jika

kemauan masyarakat dalam mengembangkan wisata B-29 sangat baik. Didukung lagi, dengan pernyataan dari Bapak Dian selaku pengelola paguyuban ojek menyatakan bahwa paguyuban ojek ini sering melakukan sosialisasi dengan paguyuban ojek di luar wisata B-29 yang kegiatannya pun didasarkan atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dengan adanya hal tersebut, membuktikan bahwa kemauan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata B-29 sangat tinggi.

Selain itu, jika kemauan masyarakat untuk berpartisipasi tidak ada maka program yang telah dicanangkan tidak akan berjalan dengan baik dan berhasil. Salah satu kemauan masyarakat yang ada dikondisi riil mereka sudah mengerti bagaimana cara mereka menerima tamu dengan baik dan sopan.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor – faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Faktor penghambat yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata akan dibahas peneliti terdiri dari beberapa faktor. Adapun faktor penghambatnya adalah :

(1) Kurangnya Dana

Dana APBD untuk pengembangan pariwisata B-29 masih tergolong kurang. Keterbatasan yang dialami dalam partisipasi pengembangan objek wisata ini tentunya sangat menghambat dalam partisipasi masyarakat, dana sendiri merupakan salah satu alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Karena hampir semua kegiatan atau program yang dilaksanakan tentunya membutuhkan dana. Hal tersebut sesuai dengan Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah dana.

Pariwisata di Kabupaten Lumajang merupakan sektor prioritas yang selalu dikedepankan. Namun, pada kenyataannya peneliti yang melakukan wawancara dengan pengelola wisata B-29 Bapak Supriyanto menyatakan bahwa dana untuk pengembangan pariwisata di B-29 masih sangat kecil. Hal itu pula ditegaskan kembali oleh ketua pokdarwis B-29 Bapak Budiyanto yang menyatakan bahwa masyarakat di B-29 tidak mengetahui berapa besar dana yang diberikan pemerintah untuk pengembangan wisata dikarenakan selama ini untuk melakukan kegiatan mereka saling menyumbang. Oleh karena itu, partisipasi masih tidak berjalan seara optimal.

Dari hasil wawancara dan kondisi riil di wisata B-29 peneliti

menyatakan bahwa dana yang diberikan pemerintah dalam pengembangan pariwisata tergolong rendah hal tersebut dapat dilihat dari minimnya fasilitas penunjang yang menjadi magnet tertentu bagi wisatawan dan pengunjung objek wisata.

Dengan kondisi seperti di atas masyarakat setempat merasa belum mendapatkan nilai tambah secara ekonomi sehingga partisipasi masyarakat terpengaruh karena menurut masyarakat sekitar lebih baik bekerja berkebun daripada ikut – ikut (berpartisipasi) dalam mengembangkan pariwisata.

(2) Rendahnya Pengetahuan atau pendidikan masyarakat

Pengetahuan dan pendidikan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangatlah penting. Namun apabila masyarakat sendiri tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan yang kurang maka akan menghambat tingkat partisipasi masyarakat. hal ini dikarenakan, masyarakat kurang mengerti bagaimana cara mereka berkontribusi untuk mengembangkan pariwisata ke arah yang lebih baik lagi. Hal itu sesuai dengan pernyataan Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Rendahnya Pengetahuan atau pendidikan masyarakat

Berdasarkan teori dan fakta yang ada di lapangan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata B-29 di Desa Argosari ini masih tergolong rendah salah satunya dikarenakan

keterbatasan pengetahuan mereka mengenai pentingnya peran mereka dalam mengembangkan pariwisata dan masyarakat disana pendidikannya juga masih tergolong rendah sehingga apabila diberikan pemahaman tidak bisa langsung diterapkan dan dipahami secara matang. Misalnya mereka belum bisa memahami bahasa asing jika ada wisatawan asing yang berkunjung ke wisata Puncak B-29.

(3) Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Menurut Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat juga disebabkan oleh faktor kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, kegiatan partisipasi untuk pengembangan pariwisata tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jika, mereka berpartisipasi belum tentu bisa mencukupi kebutuhan mereka.

Menurut peneliti dari hasil wawancara dengan pengelola tempat wisata menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Argosari kawasan wisata B-29 masih tergolong semu artinya mereka beranggapan bahwa ketika mereka berpartisipasi belum tentu nantinya akan memiliki penghasilan sesuai kebutuhan mereka sehingga masyarakat di Desa Argosari lebih memilih menekuni pekerjaan mereka yaitu rata-rata berkebun yang merupakan mata pencaharian.

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang meliputi beberapa tahap yaitu :

- a. Partisipasi Tahap Persiapan, tahap ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata B-29 di Desa Argosari dimulai dari sosialisasi terlebih dulu untuk mengetahui program – program apa saja yang dilakukan dalam mengembangkan objek wisata B-29. Namun, pada tahap perencanaan ini partisipasi masyarakat Desa Argosari dalam pengembangan wisata B-29 sangat antusias namun, tidak menyukai teori – teori melainkan lebih suka praktik langsung.
- b. Partisipasi Tahap Perencanaan, tahap ini menjelaskan tentang rencana – rencana yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Argosari dalam mengembangkan pariwisata B-29. Partisipasi masyarakat ditahap ini bersifat fungsional. Partisipasi masyarakat Desa Argosari dalam pengembangan wisata B-29 masih tergolong semu artinya. Tidak semua masyarakat menerima dan berperan aktif dalam pengembangan wisata B-29.

c. Partisipasi Tahap Operasional, tahap ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat Desa Argosari dibagi menjadi dua yaitu partisipasi fisik maupun partisipasi non fisik. Partisipasi masyarakat Desa Argosari dalam mengembangkan wisata B-29 pada tahap operasional ini tergolong bagus, artinya mereka berkontribusi dalam pengembangan wisata B-29.

d. Partisipasi Tahap Pengembangan, tahap ini menjelaskan bahwasannya partisipasi masyarakat Desa Argosari dalam mengembangkan pariwisata B-29 sudah atas kesadaran mereka sendiri untuk memulai mengembangkan Wisata B-29. Dalam tahap pengembangan ini, partisipasi masyarakat sudah terlihat baik yaitu mereka sudah mampu mengelola usaha – usaha mereka seperti mengelola rumah makan, *homestay* namun, belum tersedianya tempat yang menyedihkan oleh-oleh khas wisata B-29.

e. Partisipasi Tahap Pengawasan, tahap ini menjelaskan bahwa proses dan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata B-29 tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak dilakukan pengawasan dalam proses pengembangannya. Partisipasi masyarakat Desa Argosari dalam pengembangan wisata B-29 sudah melakukan dengan baik artinya mereka sudah melakukan pengawasan dalam mengembangkan wisata B-29 yaitu melalui tindakan preventif.

2. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yaitu adanya kemauan dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ada 2 (dua) yaitu kurangnya dana dan rendahnya pengetahuan atau pendidikan masyarakat dan kurang sesuai dengan kebutuhan mereka.

V.2. Saran

Saran yang diberikan peneliti dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Argosari khususnya untuk mengembangkan pariwisata B-29 yaitu :

1. Pemerintah lebih melakukan pertemuan – pertemuan yang rutin agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat Desa Argosari khususnya kawasan wisata B-29 serta menerapkan konsep CBT (*Community Based Tourism*). Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan perbaikan dalam sisi infrastruktur, seperti penyediaan dan pemeliharaan jalan, toilet umum, maupun tempat makan bagi pengunjung (wisatawan) yang baik dan terjaga.
2. Kelompok sadar wisata dalam meningkatkan partisipasi masyarakat harus dilakukan lebih intensif lagi atau secara berkelanjutan tidak hanya dilakukan hanya beberapa kali saja. Karena program – program yang dibuat oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Argosari sangat menarik, dan sayang sekali jika tidak dijalankan, seperti awal pengembangan wisata

B-29. Salah satu kegiatannya yaitu Kemah Wisata dan My Trip yang mana dilakukan setiap tahunnya. Dan setiap bulan, diadakan persamuhan antar warga adat yang di dalamnya nanti membuat ciri khas yang berkaitan dengan wisata Tengger (misal: merangkai Bunga Edelwis).

3. Masyarakat Desa Agosari khususnya lebih mengembangkan kearifan lokal yang mereka miliki, karena kearifan lokal yang ada di Desa Argosari sangat unik. Sebenarnya jika hal ini dikenalkan kepada wisatawan akan membuat kesan terbaik jika berkunjung ke puncak B-29. Salah satu kearifan lokal yang tidak diketahui masyarakat umum ialah *medaeng*, yaitu istilah untuk menghangatkan diri di perapian.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nikita dkk. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis(JAB) Vol. 6 No.3 Agustus 2018*.
- As'at. (2017). *Pengabdian Tanpa Henti (birografi Drs. KH. As'at M.Ag)*. Lumajang: Sentral Percetakan.
- Bafadhal, Aniesa Samira. (2018). *Perencanaan Bisnis Pariwisata (Pendekatan Lean Planning)*. Malang : UB Press.
- Balkis, Tiara A. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Sarana dan Prasaranan Lingkungan Pemukiman Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Kotalama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)*. [Skripsi]. Malang (ID). Universitas Brawijaya Malang.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang. 2019. *Kecamptan Senduro dalam Angka 2019*. Kabupaten Lumajang
- Creswelll, John W. (2014). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Erawati, Intan dan Mussadun. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Mangrove di Desa Bedono, Kecamatan Sayung. *Jurnal Ruang Vol. 1 No. 1 tahun 2013*.
- Eva. (2018). *Ingin Wisata Ke B-29? Waspadai Harga Ojek Di Sana*. Diakses melalui : <http://www.beritametro.news/plesir/ingin-wisata-ke-b-29-waspadai-harga-ojek-di-sana>. Pada Tanggal 31 Oktober 2019.
- Firdausya, Zhafrani. (2017). *Penegmabnagn Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal Melalui Pendekatan kemitraan*. [Skripsi]. Malang (ID). Universitas Brawijaya Malang.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kartasasmita, Ginanjar. (1997). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Gava Media.
- Katolani, Wanjat. (2008). Pengembangan Wisata Terpadu Berdasarkan Daya Tarik Kawasan Konservasi di Kecamatan Cimenyan. *Jurnal Geografi Gea Vol. 8 No. 1 tahun 2008*
- Makmur, Mochammad. (2003). *Dasar – Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Pulik*. Malang : Medio.
- Meray, Josie Geraldly dkk. (2016). Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamtan Kakas. *Jurnal Spasia: Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol 3 No. 3 tahun 2016*
- Mikkelsen, Britha. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pendit, Nyoman S. (2002). *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Desa Wisata
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
- Pitana, I Gede dan Diarta, I Ketut S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Pramudiarto, Renanda E. (2018). *Pengembangan Pariwisata Alam Dalam Meningkatkan Daya Saing Pariwisata*. [Skripsi]. Malang (ID). Universitas Brawijaya:Malang.
- Prasiasa, Dewa Putu Oka. (2011). *Wacana Kontemporer Pariwisata*. Jakarta: Penerbit salemba Humanika.
- Prasiasa, Dewa Putu Oka. (2013). *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Ratnaningsih, Ni Luh Gede dan Mahagangga, I Gst Agung. (2015). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata (Studi Kasus di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata (JDP)*Vol. 3 No. 1 2015.
- RIPPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten Lumajang (2015).
- Rofik. (2018). *Masa Depan Lumajang (Kajian Dasar Pembangunan Daerah)*. Lumajang.
- Samsuridjal D & Kaelany H.D. (1996). *Peluang di Bidang Pariwisata*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Sastropoetro, Santoso. (1998). "Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni
- Sherry R Arnstein. (1969). A ladder of Citizen Participation. *Journal of American Planning Association*. 35:4. Page 216-224.
- Siagian, SP. (2007). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suansri, Potjana. (2003). *Community Based Tourism Hand Book*. Tahiland:Rest Project.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dari R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto dan Hetifah. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance 20 Prakarasa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Suwartono, Gamal. (2004). *Dasar – Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Soebago. (1991). *Desa Wisata Di Bali (Tantangan Dan Kesempatan)*. Dalam kertas kerja PPM/UGM, Yogyakarta.
- Solichah, Zumrotun. (2019). *Pemkab Lumajang Benahi Infrastruktur untuk Kembangkan Wisata Puncak B-29*. Diakses melalui : <https://banten.antaranews.com/berita/68787/pemkab-lumajang-benahi-infrastruktur-untuk-kembangkan-wisata-puncak-b-29>. Pada tanggal 12 November 2019.
- Spillane, James, J. (1994). *Pariwisata Indonesia : Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta : Kanisius.

Timothy, DJ. (1999). Participatory Planning a View of Tourism in Indonesia. *Jurnal Annuals Review of Tourism Research*. Vol. 26 No. 2, pp 371-391 Tahun 1999.

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Riset



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 16225 /UN10.F03.11/PN/2019
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang
Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Lumajang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa :

Nama : Farahdiba Elfa Putri Nawangsih
Alamat : JL. Jend. Suprpto Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Rogotrunan.
Kec. Lumajang. Kab. Lumajang
NIM : 165030101111003
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
Lokasi : Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
Waktu : Desember 2019 s/d Februari 2020

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 16 Desember 2019

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik



(Signature)
Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D.
1967017 199103 1 010



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 16325 /UN10.F03.11/PN/2019
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
Di Kawasan Wonorejo Terpadu Lumajang, Kedungjajang, Krajan, Wonorejo, Kec.
Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa :

Nama : Farahdiba Elfa Putri Nawangsih
Alamat : Jl. Jend. Suprpto Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Rogotrunan.
Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
NIM : 165030101111003
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
Lokasi : Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
Waktu : Desember 2019 s/d Februari 2020

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 16 Desember 2019

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D.
NIP.1967017 199103 1 010

Lampiran 2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Untuk Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

1. Bagaimana sejarah terbentuknya pariwisata B-29, kenapa dinamakan b-29?
2. Bagaimana pengembangan pariwisata B-29 hingga menjadi objek wisata yang diminati wisatawan ?
3. Bagaimana kondisi pariwisata dan perekonomian masyarakat Desa Argosari ?
4. Bagaimana pengembangan pariwisata B-29 Desa Argosari Kecamatan Senduro ?
5. Apa saja faktor pendukung yang memengaruhi pengembangan pariwisata B-29 Desa Argosari Kecamatan Senduro ?
6. Apa saja faktor penghambat yang memengaruhi pengembangan pariwisata B-29 Desa Argosari Kecamatan Senduro ?
7. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengenalkan B-29 kepada wisnus dan wisman ?
8. Apakah pemerintah Kabupaten Lumajang telah memiliki agen – agen pariwisata di luar Kabupaten ?
9. Berapa persen anggaran pariwisata yang disediakan pemerintah melalui dana APBD?
10. Apakah pemerintah dalam mengembangkan objek wisata B-29 selalu melibatkan masyarakat, dalam hal apa saja ?
11. Bentuk partisipasi masyarakat apa saja yang dibutuhkan pemerintah dalam mengembangkan objek wisata B-29 ?

Pedoman Interview Guide

Untuk Kelompok Sadar Wisata dan Pengelola Wisata B-29

1. Manfaat apa yang diperoleh atau dirasakan masyarakat di Desa Argosari dengan adanya B-29 ?
2. Apakah ada dukungan dari pemerintah maupun pihak swasta ?
 - a. Jika didukung oleh pemerintah, apa saja dukungan yang diberikan ?
 - b. Jika didukung oleh swasta apa saja dukungan yang diberikan ? dan mengapa pihak swasta bersedia mendukung pariwisata B-29 ?
3. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 Desa Argosari Kecamatan Senduro ?
4. Apakah ada faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 Desa Argosari Kecamatan Senduro ?
5. Apakah ada faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 Desa Argosari Kecamatan Senduro ?
6. Bagaimana peran dari Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan pariwisata B-29 Desa Argosari Kecamatan Senduro ?
7. Apa saja kendala utama dalam mengembangkan B-29 sebagai objek wisata unggulan ?
8. Berapa persen anggaran pariwisata yang disediakan pemerintah melalui dana APBD?
9. Bagaimana eksistensi Pokdarwis turut serta dalam mengembangkan B-29 sebagai objek wisata unggulan ?
10. Apakah pemerintah dalam mengembangkan objek wisata B-29 selalu melibatkan masyarakat, dalam hal apa saja ?

Pedoman Interview Guide

Untuk Pengelola Paguyuban Ojek Wisata B-29

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Argosari dengan adanya objek wisata B-29 ?
2. Bagaimana pengembangan pariwisata B-29 ?
3. Apa saja bentuk partisipasi dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata B-29 Desa Argosari Kecamatan Senduro ?
4. Bagaimana sikap wisatawan terhadap warga sekitar dan kebudayaan lokal ?
5. Apa saja harapan masyarakat dengan adanya objek wisata B-29 ?
6. Adakah momen – momen tertentu objek wisata B-29 banyak dikunjungi oleh wisatawan ?
7. Apakah pemerintah dalam mengembangkan objek wisata B-29 selalu melibatkan masyarakat, dalam hal apa saja ?



Lampiran 3. Logbook Penelitian

LOGBOOK PENELITIAN

Nama : Farahdiba Elfa Putri Nawangsih

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata B-29 di Desa Argosari Kecamatan Sendruo kabupaten Lumajang

NO	Tanggal	Tempat	Topik	Keterangan
1	02/01/2020 Pukul (10.30-12.00)	Ruang Tamu Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang	1. Pengembangan Pariwisata B-29 2. Partisipasi Masyarakat B-29	Wawancara dengan Bapak Fandi Ahmat Seksi Destinasi Pariwisata
2	06/01/2020 Pukul (11.00-13.00)	Ruang Tamu Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang	1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengembangan objek Wisata B-29 2. Program – program yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan objek wisata B-29	Wawancara dengan Seksi Destinasi Pariwisata : 1. Ibu Ana 2. Bapak Fandi Ahmat
3	13/01/2020 Pukul (09.30 – 10.30)	Ruang Tamu Kantor Pengelola Pariwisata B-29	1. Gambaran mengenai masyarakat B-29 yang berpartisipasi 2. Bentuk Partisipasi masyarakat B-29 dalam mengembangkan wisata	Wawancara dengan : Bapak Supriyanto Pengelola wisata B-29

NO	Tanggal	Tempat	Topik	Keterangan
4	13/01/2020 Pukul (11.00-11.30)	Teras rumah Ketua Pokdarwis	Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wisata B-29	wawancara dengan Bapak Budiyanto Ketua Pokdarwis B-29
5	13/01/2020 Pukul (13.00-14.00)	Pos masuk B-29	1. Partisipasi masyarakat B-29 Kelemahan masyarakat dalam mengembangkan wisata B-29	Wawancara dengan : Bapak Dian Pengelola Paguyuban Ojek didampingi Bapak Bukhori penjaga pos masuk B-29
6	21/01/2020 Pukul (09.00-10.30)	Ruang Tamu Kantor Pengelola Pariwisata B-29	1. Kegiatan atau program yang diberikan pemerintah dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat 3. Anggaran yang diberikan pemerintah dalam mengembangkan wisata B-29	Wawancara dengan : Bapak Supriyanto Pengelola wisata B-29
7	09/02/2020 Pukul (11.00-12.30)	Puncak B29	Mencari informasi terkait partisipasi dan pengembangan wisata B-29	Wawancara dengan Bapak Bagong (selaku masyarakat yang

NO	Tanggal	Tempat	Topik	Keterangan
				berjualan dilokasi)
8	09/02/2020 Pukul (13.00-15.15)	Ruang Tamu Rumah Ketua Pokdarwis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan wisata B-29 dan asal mulanya 2. Tidak adanya kerja sama dengan phak swasta 3. Bentuk partisipasi masyarakat B-29 dalam mengembangkan wisata 4. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wisata 5. Kegiatan atau program – program yang dilakukan dalam partisipasi masyarakat 	Wawancara dengan Bapak Budiyanto selaku Ketua Pokdarwis B-29
9	10/02/2020 Pukul (10.00 – 10.30)	Ruang Tamu Kantor Pengelola Pariwisata B-29	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi masyarakat Desa argosari 2. Kegiatan pengawasan dari penglolah wisata B-29 	Bapak Supriyanto dan Bapak Nova
10	10/02/2020 Pukul (11.00-12.00)	Puncak B-29		Dokumentasi tempat Lokasi Puncak B-29
11	10/02/2020 Pukul (13.00-13.30)	Rumah Pengelola Paguyuban Ojek B-29	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat 2. Keinginan dari masyarakat dan bentuk partisipasi 	Wawancara dengan Bapak Dian

NO	Tanggal	Tempat	Topik	Keterangan
			dalam pengembangan wisata Kegiatan dari paguyuban ojek B-29	



Lampiran 4. Foto Observasi/Dokumentasi Penelitian



Gambar 10. Bersama Bapak Kepala Desa Beserta *Staff* Desa (Observasi Penulis 2020)



Gambar 11. Wawancara dengan Bapak Dian dan Bapak Bukhori (2020)



Gambar 12. Wawancara dengan Bapak Supriyanto (2020)

Lampiran 5.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Farahdiba Elfa Putri Nawangsih

NIM : 165030101111003

Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 20 Maret 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Jend. Suprpto No 27 A RT. 01 RW. 01

Kel. Rogotruman Kabupaten Lumajang

No. Telp : 089648307162

Email : farahdibaelfa97@gmail.com

**PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD Islam Tompokersan Lumajang (2004 – 2010)
2. SMP Negeri 5 Lumajang (2010 – 2013)
3. SMA Negeri 2 Lumajang (2013 – 2016)

PENGALAM KERJA

Praktek Kerja Lapangan/Magang : Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia – Jakarta (2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

Staff Biru Muda Humanistik (SBM Humanistik) (2016)